

LAPORAN KINERJA

Tahun 2022



Biro Pemberitaan Parlemen
Sekretariat Jenderal DPR RI

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id

Daftar isi

KATA PENGANTAR	0
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	6
A. KELEMBAGAAN	7
B. DASAR HUKUM.....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI	8
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	10
E. PERAN STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. TUJUAN DAN SARAN	13
B. PERJANJIAN KINERJA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN TAHUN 2022	14
BAB III CAPAIAN OUTPUT KINERJA	16
A. BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	16
B. BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	57
C. BAGIAN PENERBITAN.....	87
D. BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN.....	106
BAB IV PENUTUP	1084

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya, walaupun di tengah-tengah Pandemi Covid-19, kita masih diberikan kesehatan untuk mengemban amanah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan dapat menyelesaikan Buku Laporan Kinerja (LKJ) Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR-RI melalui Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Tahun 2022 menyajikan berbagai capaian strategis dan keberhasilan di Pemberitaan Parlemen. Selain dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja menuju terwujudnya *Good Governance*, buku ini juga menjadi media pertanggungjawaban kepada publik.

Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh jajaran Biro Pemberitaan Parlemen atas kerja keras serta dedikasinya sehingga apa yang kita kerjakan bersama dapat membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, yaitu terwujudnya Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami membuka diri terhadap berbagai masukan, baik kritik, saran maupun pandangan konstruktif yang ditujukan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini, khususnya untuk pembuatan Laporan Kinerja selanjutnya karena Laporan Kinerja ini akan terus mengikuti perkembangan dinamika sesuai dengan perubahan yang terjadi di lembaga legislatif kita.

Jakarta, 6 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R. Sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022. Biro Pemberitaan Parlemen telah menyusun Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sekaligus sebagai *feedback* dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan media untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja Biro Pemberitaan Parlemen, khususnya kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

Capaian kinerja Biro Pemberitaan Parlemen sebagaimana terlihat dari capaian kinerja Satker Setjen sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2022. Adapun capaian kinerja Satker Setjen Biro Pemberitaan Parlemen adalah:

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pemberitaan DPR RI	1.	Jumlah pemirsa/ pendengar/ penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI	348 Juta
		2.	Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI	1 hari
		3.	Persentase realisasi anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	90%
		4.	Jumlah pembaca E-Magazine dan E-Buletin Parlementaria melalui aplikasi E-Media DPR RI	150.000 Pembaca
2.	Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI	1.	Jumlah viewer/ follower/ subscriber media sosial DPR RI	10000000

Berdasarkan hasil pengukuran indikator di atas, pengukuran capaian sasaran kegiatan dari Biro Pemberitaan Parlemen adalah **100%**. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespons tuntutan dukungan kepada DPR RI yang semakin dinamis. Dengan demikian, hasil capaian kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Alokasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2022 untuk mencapai sasaran strategis unit kerja Biro Pemberitaan Parlemen adalah sebesar **Rp 129.593.239.000,-**. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemberitaan Parlemendari pagu anggaran yang

dialokasikan tersebut, sampai dengan Desember 2022, yang dapat direalisasikan adalah sebesar **Rp 128.538.524.919,-** dengan persentase **99,19%**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Satker	Pagu	Realisasi	% (realisasi)	Keterangan
		Rp	Rp		
1.	Biro Pemberitaan Parlemen	21.717.745.000	21.650.658.000	99,69%	Realisasi Anggaran tersebut untuk kegiatan : a. Pelaksanaan jamuan rapat-rapat b. Perjalanan dinas dalam rangka publishing house c. Pembayaran PPNPN tahun 2022 d. Perawatan/servic es peralatan
2.	Bagian Media Cetak dan Media Sosial	43.515.099.000	42.644.324.557	98%	Realisasi Anggaran tersebut untuk kegiatan : a. Narasumber dan jamuan rapat FGD, koordinasi analis Media dan Media Cetak b. Narasumber perjadin wartawan, serta jamuan diskusi dialektika demokrasi dan forum legislasi c. Forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI di dalam dan luar kota d. Pelaksanaan diseminasi informasi analis media e. Bloking media cetak dan media sosial

3.	Bagian Televisi dan Radio Parlemen	54.850.979.000	54.750.455.660	99,82%	<p>Realisasi anggaran untuk kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lelang Filler dan PSA di Stasiun Televisi telah di laksanakan b. Produksi dan Penayangan Program 3 Dekade dengan TVRI c. Penyiaran Insert Dialog Interaktif dan PSA di Stasiun Radio d. FGD/Lokakarya Radio Parlemen dengan Anggota DPR RI bersama Radio e. Perawatan Jaringan Komunikasi dan Fiber Optic di 11 Komisi, AKD dan Liputan, Editing, IT dan Program dan Produksi TVR Parlemen f. Pengadaan peralatan liputan dan live streaming, Editting, Studio, Tekn Program dan Produksi Bagian TVR Parlemen
4.	Bagian Penerbitan	9.509.416.000	9.493.086.000	99,83%	<p>Realisasi anggaran untuk kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Kiosk Touchscreen Digital Signag E-Magazine dan E-Media b. Pengadaan Aplikasi dan

					Infrastruktur E- Media DPR RI c. Pengadaan Scanner Docuprint untuk alih Media Digital d. Pencetakan Buku-Buku AKD dan Setjen e. Paket Training /Workshop f. Paket meeting g. Perjalanan Dinas h. Honorarium Panitia Pengadaan i. Honorarium Tim j. Jamuan rapat koordinasi
--	--	--	--	--	--

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen secara keseluruhan, yaitu perlu dilakukan upaya-upaya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Citra Pimpinan dan Anggota DPR RI melalui dukungan pemberitaan di media cetak, *website* dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.
2. Meningkatkan peliputan, pemberitaan mengenai kegiatan DPR RI dan Setjen DPR RI melalui media cetak, *website* dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan
3. Meningkatkan Pendidikan dan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia terkait dengan dukungan teknis dan administrative guna meningkatkan keterampilan dan kemampuannya sehingga dukungan kepada DPR RI dan Setjen DPR RI menjadi lebih optimal, professional dan akuntabel.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana unit kerja di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen yang telah ditetapkan, secara berjenjang dan periodik, perbulan atau per triwulan.

BAB I

PENDAHULUAN

Biro Pemberitaan Parlemen adalah salah satu unit eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, yang secara umum memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Sebagai bagian dari Setjen, Biro Pemberitaan Parlemen merupakan unsur penting di dalam meningkatkan citra DPR RI. Sebagai aparatur pemerintahan, Biro Pemberitaan Parlemen dituntut melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana instansi pemerintahan lainnya. Artinya bahwa jajaran Biro Pemberitaan Parlemen harus dapat akuntabel serta dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahun 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (2020 – 2024) dimana arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategi dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya. Penyusunan laporan kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dalam kerangka itulah, penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Biro Pemberitaan Parlemen yang diamanahkan selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen pada masa yang akan datang.

A. KELEMBAGAAN

Perlu kami sampaikan bahwa Biro Pemberitaan Parlemen mengalami restrukturisasi dan reposisi organisasi di tahun 2020. Bagian Humas yang semula berada di Biro Pemberitaan Parlemen sekarang berada di Biro Humas dan Protokol, berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020, serta mengalami kekosongan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI selama kurun waktu 16 bulan dan telah memiliki Kepala Biro Pemberitaan Parlemen sejak Bulan November 2021.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 1842).
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 986).

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Tencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019).
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Adapun kelembagaan Biro Pemberitaan Parlemen diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, terakhir diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

Biro Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di media cetak dan media sosial, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
3. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan *website*;
4. Penyelenggaraan televisi dan radio;
5. Penyelenggaraan urusan penerbitan;
6. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan

7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun unit-unit kerja yang berada di bawah Biro Pemberitaan Parlemen, sebagai berikut:

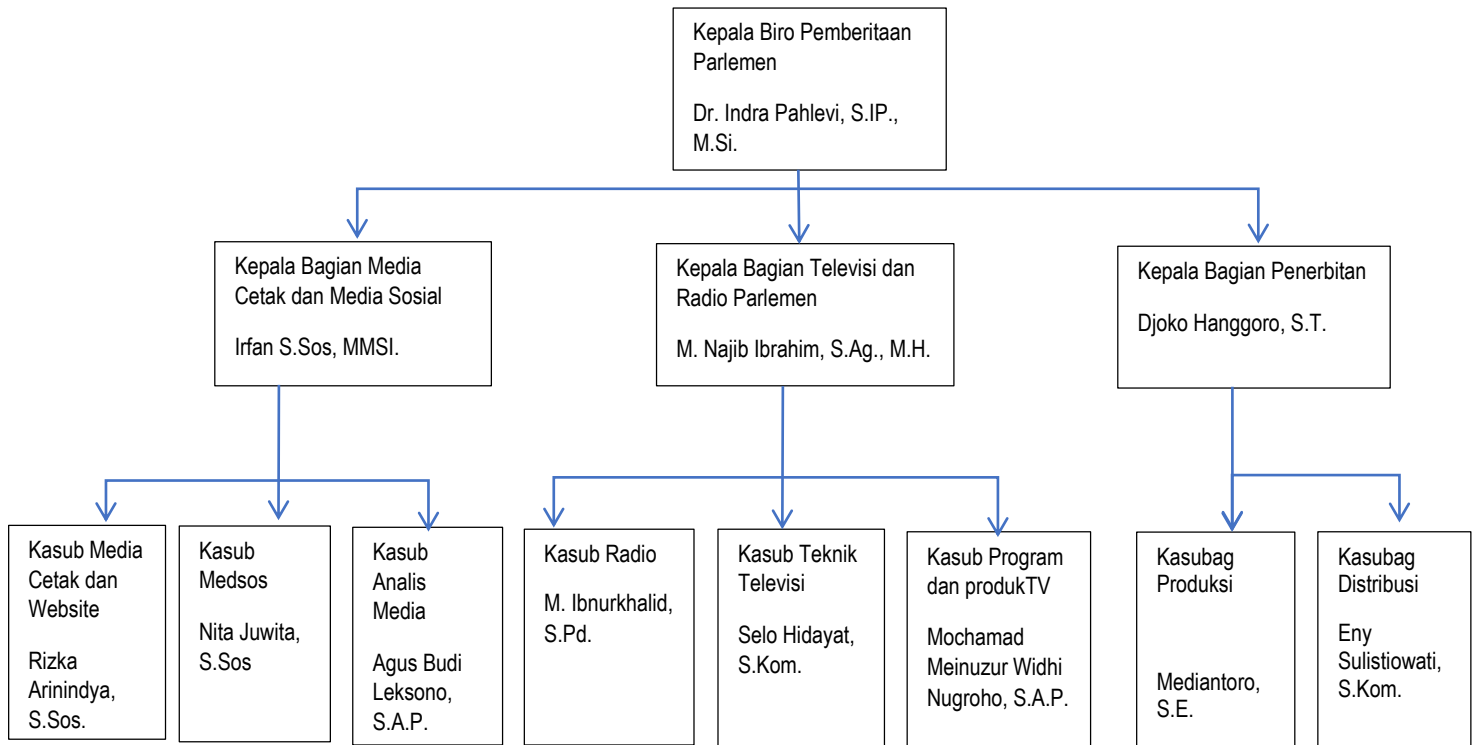
- a. Bagian Media Cetak dan Media Sosial, terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 3 (tiga) Kasubag;
 - Subbagian Media Cetak dan *Website*;
 - Subbagian Media Sosial; dan
 - Subbagian Analisis Media.

- b. Bagian Televisi dan Radio Parlemen, terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 3 (tiga) Kasubag;
 - Subbagian Program dan Produksi Televisi;
 - Subbagian Teknik Televisi; dan
 - Subbagian Radio.

- c. Bagian Penerbitan terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag
 - Subbagian Produksi; dan
 - Subbagian Distribusi.

Struktur organisasi Biro Pemberitaan Parlemen secara keseluruhan tertuang dalam gambar dibawah ini :

TABEL 1
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Keseluruhan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen berjumlah 46 (empat puluh enam) orang, yang tersebar di 3 (tiga) Bagian unit kerja, adapun secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2
JUMLAH PEGAWAI BIRO PP

JABATAN/BAGIAN	PNS	PPNASN
Biro Pemberitaan Parlemen	1	1
Bagian Media Cetak dan Media Sosial	22	48
Bagian Televisi dan Radio Parlemen	43	160
Bagian Penerbitan	4	8
Total Jumlah SDM Biro PP	70	217

TABEL 3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Biro	TVR	Penerbitan	Medtaksos
Doktor	1	0	0	0
Magister (S2)	0	8	1	2
Sarjana (S1)	1	143	8	55
Diploma (D3)	0	26	1	7
SMU/SMA/SMK	0	26	2	6
Jumlah	2	203	12	70

TABEL 4
JUMLAH PNS DI BIRO PP

Golongan	Biro	TVR	Penerbitan	Medtaksos
I	0	0	0	0
II	0	14	0	1
III	0	27	3	20
IV	1	2	1	1
Jumlah	1	43	4	22

E. PERAN STRATEGIS

Peran Biro Pemberitaan Parlemen dalam mewujudkan dan mengimplementasikan tujuan dalam renstra Setjen DPR RI serta visi dan misi dari deputi Bidang Persidangan memiliki peran yang sangat strategis yaitu harus mampu menyesuaikan dengan indikator spesifik dari pelayanan publik, seperti standart pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Mendorong kegiatan media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan melakukan penguatan konten program dan perluasan jaringan di seluruh Indonesia, membangun aplikasi yang dapat diakses melalui aplikasi *smartphone* (android dan IOS).

Biro Pemberitaan Parlemen mendukung penyelenggaraan publikasi kegiatan rapat-rapat di lingkungan DPR RI yang keputusannya merupakan keputusan mengikat, yang harus dilaksanakan oleh seluruh Anggota DPR dan AKD. Oleh

sebab itu, kecepatan, ketepatan serta kualitas kerja SDM di Lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen harus maksimal dan berkualitas serta Profesional sehingga mencerminkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pemberitaan Parlemen berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada rencana strategis Deputi Persidangan yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pemberitaan Parlemen berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Deputi Persidangan yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara pimpinan unit eselon II kepada Deputi Persidangan setiap awal tahun anggaran.

Sebagai salah satu unsur *supporting sistem* di Sekjen DPR RI dalam hal ini Deputi Persidangan, dibidang keterbukaan informasi, maka indikator spesifik dari rencana kerja biro Pemberitaan Parlemen adalah dalam pengelolaan pelayanan publik, seperti standart pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2020-2024, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemberitaan Parlemen, yaitu:

- a. Keterbukaan Informasi; dan
- b. Pelayanan berdasarkan SPBE.

Tujuan dan Sasaran kinerja Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui *platform* Media sosial, Media Cetak, TV dan Radio, serta penerbitan;
- b. Melaksanakan Pelayanan berdasarkan SPBE (sistem pelayanan berbasis elektronik)

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pemberitaan Parlemen adalah terwujudnya :

- a. Dukungan keterbukaan informasi DPR RI, melalui platform media sosial, media cetak, media elektronik;
- b. Terwujudnya pengelolaan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik dibidang pelayanan informasi berbasis SPBE;
- c. Terwujudnya akuntabilitas.

B. PERJANJIAN KINERJA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pemberitaan Parlemen dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan realisasinya.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pemberitaan DPR RI	1.	Jumlah pemirsa/ pendengar/ penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI	348 Juta

		2.	Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI	1 hari
		3.	Persentase realisasi anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	90%
		4.	Jumlah pembaca E-Magazine dan E-Buletin Parlementaria melalui aplikasi E-Media DPR RI	150.000 Pembaca
2.	Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI	1.	Jumlah viewer/ follower/ subscriber media sosial DPR RI	10000000

BAB III

CAPAIAN OUTPUT KINERJA

A. BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

1. SUBBAGIAN MEDIA CETAK DAN WEBSITE

SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET 2022	CAPAIAN	%
2	Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website	1 hari (24 Jam)	4,6 jam	522%

Tingkat kecepatan penayangan berita di website berdasarkan proses peliputan yang dilaksanakan, mengingat peliputan dilaksanakan di lingkungan Gedung DPR RI, di luar Gedung DPR RI tetapi masih di wilayah DKI, peliputan pada saat kunjungan kerja spesifik dan reses serta peliputan kegiatan saat kunjungan kerja lapangan (DKI Jakarta). Proses waktu yang dibutuhkan mulai dari peliputan sehigga menjadi berita dan tayang di website berbeda-beda, sebagaimana ditampilkan dalam tabel kinerja peliputan dibawah ini.

No.	Jenis Liputan	Waktu
1	Peliputan kegiatan Dewan dan Kesenjangan di Lingkungan Gedung DPR RI	± 3 jam
2	Peliputan kegiatan Dewan dan Kesenjangan di luar Gedung DPR RI (DKI Jakarta)	± 4 jam
3	Peliputan kegiatan Dewan saat Kunjungan Kerja Spesifik	± 6 jam
4	Peliputan kegiatan Dewan saat Kunjungan Kerja Reses	± 6 jam
5	Peliputan kegiatan Dewan saat Kunjungan Kerja Lapangan (DKI Jakarta)	± 4 jam

Target tingkat kecepatan penayangan berita di Website adalah 1 hari atau dalam hitungan jam adalah 24 jam. Capaian kecepatan penayangan berita yang dihasilkan dari kinerja reporter yang berbeda-beda tersebut disepakati bahwa angka capaian adalah angka rata-rata dari hasil kinerja reporter tersebut sehingga tercapai angka 4,6 jam. Angka ini menjadikan capaian lebih cepat dari target 522%. Percepatan waktu yang dihasilkan tidak terlepas dari peran teknologi informasi dan teknologi broadcasting yang telah dikuasai oleh tim editing di Setjen DPR RI, yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Bagian Media Cetak dan Media sosial, khususnya Sub Bagian Media Cetak dan Website memiliki kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Bloking advetorial melalui Media Cetak
- 2) Peliputan Berita dan Foto:
 - a) Majalah Parlementaria
 - b) Bulletin Parlementaria
 - c) Pengelolaan webiste www.dpr.go.id
- 3) Mengkoordinasikan peliputan media massa di lingkungan Gedung DPR RI.
- 4) Mengumpulkan, menyeleksi Pembuatan ID Pers wartawan dilingkungan DPR RI
- 5) Menyebarkan dan mensosialisasikan pers release kepada wartawan Parlemen
- 6) Forum Komunikasi dan sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.
- 7) Mengadakan kegiatan Diskusi Rutin.
 - a) Dialektika Demokrasi
 - b) Forum Legislasi
 - c) Pameran Foto
- 8) Laporan Rencana Kegiatan Sub Media Cetak

1) SOSIALISASI BLOKING ADVETORIAL MELALUI MEDIA CETAK

Sub Bagian Media Cetak memiliki tugas mensosialisasikan kegiatan Dewan melalui Media cetak baik media mainstream/nasional maupun media lokal. Saat ini Bagian Media Cetak telah mengadakan kerjasama dengan 59 Media Massa yaitu:

Sosialisasi Bloking Advetorial melalui media cetak berupa sosialisasi kegiatan Pimpinan, AKD, Badan, dan kegiatan Setjen dan BK, juga mensosialisasikan pengumuman *fit and proper test* di AKD dan Badan.

NO	MEDIA CETAK (KORAN DAN MAJALAH)		NO	MEDIA ONLINE	
1	MEDIA INDONESIA	34	WARTA KOTA	1	KOMPAS.COM
2	KOMPAS	35	KORAN THE JAKARTA POST	2	MERDEKA.COM
3	SINDO	36	HARIAN TERBIT	3	MEDIA INDONESIA.COM
4	REPUBLIKA	37	PAKUAN RAYA	4	SUARA.COM
5	RAKYAT MERDEKA	38	KORAN JAKARTA	5	REPUBLIKA.CO.ID
6	JATENG POS	39	WARTA KOTA	6	JPNN.COM
7	RADAR BANYUWANGI	40	RADAR SEMARANG	7	ANTARANEWS.COM
8	RADAR BANDUNG	41	RADAR KEDIRI	8	RM.ID
9	RADAR BOGOR	42	RADAR KUDUS	9	JURNAS.COM
10	RADAR KARAWANG	43	KORAN RAKYAT RIAU	10	LIPUTAN6.COM
11	RADAR DEPOK	44	HALUAN	11	TRIBUNNEWS.COM
12	RADAR JOGJA	45	KORAN SUARA PEMRED	12	BERITABUANA.CO
13	RADAR SOLO	46	JAWA POS	13	REALITARAKYAT.CO
14	TRIBUN JATENG	47	MEMORANDUM	14	AKURAT.COM
15	RADAR SUMBAWA	48	RADAR SURABAYA	15	SINDONEWS.COM
16	LOMBOK POST	49	MAJALAH TEMPO	16	SEPUTARNUSANTARA.COM
17	RADAR BEKASI	50	ANALISA MEDAN	17	DETIK.COM
18	SURABAYA PAGI	51	FAJAR MAKASAR	18	MONITOR.COM
19	KABAR BANTEN	52	POST METRO	19	CAKAPLAH.COM
20	HARIAN UMUM SURYA	53	METRO 24	20	FAKTANEWS.COM
21	JABAR EKSPRES	54	SUMUT POS	21	SUARAKARYA.ID
22	TENGERANG EKSPRES	55	TRIBUN MEDAN	22	TEMPO.CO
23	RADAR BANTEN	56	METRO RIAU	23	CANTIKA.COM
24	RADAR SUKABUMI	57	TRIBUN MANADO	24	TERAS.ID
25	MAJALAH FIVE	58	KEDAULATAN RAKYAT	25	BERTUAPOS.COM
26	TRIBUN JABAR	59	PIKIRAN RAKYAT	26	SUMSELUPDATE.COM
27	RADAR TULUNGAGUNG			27	TRUSTNEWS.CO.ID
28	LAMPU HIJAU			28	ASTUNNEWS.COM
29	RADAR JEMBER			29	HALUAN.COM
30	RADAR CIANJUR				
31	TANGSEL POS				
32	WAWASAN				
33	MAJALAH SUARA ASPIRASI				

2) PELIPUTAN BERITA DAN FOTO :

Melaksanakan tugas peliputan berita terkait dengan segala kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dan isu aktual lainnya, dengan Format penulisan berita mengacu kepada kaidah jurnalistik 5w 1h yaitu: *What, Where, When, Who, Why, How*.

Melakukan reportase (pelaporan) dengan teknik wawancara, dan terjun langsung ke lapangan, serta menemui narasumber ataupun penggalian informasi. Langkah-langkahnya, yaitu Mencari informasi; Mengumpulkan informasi yang memiliki nilai berita; Membuat dan menyusunnya menjadi suatu berita; Memuat berita di media internal DPR RI (Majalah, Buletin, dan Website) dan mensosialisasikan kepada media massa.

Subbagian Media Cetak dalam melaksanakan tugasnya memuat berita Majalah Perlementaria dan Buletin Parlementaria, melakukan koordinasi dengan dengan Bagian Penerbitan. Sedangkan dalam hal memuat berita yang dimuat *Website* DPR RI (www.dpr.go.id) dan media sosial, bersinergi dengan Subbagian Media Sosial.

Pengelolaan Website (www.dpr.go.id) adalah *Situs web* suatu halaman *web* yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen (*server*) yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan organisasi setjen DPR RI. Subbagian Media Cetak mengisi dan meng-*update* konten berita dan foto yang terkait dukungan teknis penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dan kesekretariatan. Sementara kanal lainnya di Website DPR RI diisi lintas unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

TABEL 5
JUMLAH BERITA, FOTO DAN AGENDA WEBSITE DPR RI

No.	Tahun	Berita	Foto	Agenda Penugasan
1.	2018	4571	5424	1600
2.	2019	3642	5126	2297
3.	2020	3955	4177	3151
4.	2021	5539	4942	2480
5.	2022	5685	5035	2550

Kegiatan peliputan di lingkungan DPR RI tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, seiring longgarnya syarat beraktivitas dan PPKM yang telah ditetapkan selama menghadapi pandemi covid tahun 2022.

3) MENNGKOORDINASIKAN PELIPUTAN MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN GEDUNG DPR RI.

- a) Melaksanakan pendataan terhadap wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan Gedung DPR RI. Tahun 2022 Bagian Media Cetak dan Medsos telah melakukan pendataan wartawan Parlemen sebanyak 433 wartawan yang mengajukan ID Pers 2022.
- b) Berkoordinasi, bekerjasama, dan bertukar informasi terkait kegiatan serta isu aktual DPR RI kepada wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat wartawan Parlemen.
- c) Memberikan *Press Rilis* yang disebarluaskan kepada wartawan sebagai bahan berita pada media massa.

4) FORUM KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI PROGRAM KERJA DPR RI

Program *Press Gathering* atau disebut juga Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI merupakan salah satu medium dalam rangka mendekatkan Pimpinan, Anggota Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen ataupun sebaliknya.

Bagian Media Cetak dan Media Sosial menerapkan konsep kegiatan sosialisasi dengan mengadakan diskusi antara DPR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Disamping diskusi, kepada seluruh peserta diajak mengetahui potensi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Dalam pertemuan ini, diharapkan DPR bersama dengan Koordinatoriat Wartawan dapat menyerap *aspirasi* dari narasumber serta dapat memberikan sumbang saran dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada tahun 2022, Bagian Sub Media Cetak dan Website telah mengadakan acara kegiatan Forum Komunikasi dan sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di sejumlah lokasi, di antaranya:

- **Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI dengan Pimpinan DPR RI, Koordinatoriat Wartawan Parlemen, dan Setjen DPR RI ke Nusa Tenggara Barat.** Tema “**Perkuat Kolaborasi Media dan Parlemen, Wujudkan Parlemen Modern**”. Lokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah, Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.



- **Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen DPR RI ke Sentul, Bogor.** Tema “**Peran Pers dalam Menyukkseskan P20: *Stronger Parliaments for Sustainable Recovery***” Lokasi di Kota Bogor Tanggal 16 s.d. 18 September 2022, kegiatan ini dihadiri oleh **Wakil Ketua BURT Dimiyati Natakusumah, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir,**

Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.



- **Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen DPR RI ke Bogor, Jawa Barat.** Tema **“Perkokoh Sinergi Media Dan DPR RI Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”** di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, tanggal 28-30 Oktober 2022, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.



- **Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen DPR RI ke Purwokerto, Jawa Tengah.** Tema **“Refleksi Kinerja DPR RI 2022 Melalui Harmonisasi Peran Media Di Parlemen”**. Lokasi di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 25-24 November 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar beserta Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.



5) DISKUSI RUTIN

a) Forum Legislasi :

Tempat/wadah berdiskusi terkait undang-undang mengenai hukum sebelum disahkan maupun yang telah disahkan oleh badan legislatif (DPR RI) atau unsur Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Diselenggarakan setiap hari Selasa, pukul 14.00, bertempat di Ruang Press Room DPR RI Gedung Nusantara III.

b) Dialektika Demokrasi:

Adalah dialog komunikasi dua arah antara anggota dewan dan narasumber lainnya dengan wartawan mengenai isu aktual mencakup kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang berkembang dimasyarakat. Diselenggarakan setiap hari Kamis, pukul 14.00, bertempat di Ruang Press Room DPR RI Gedung Nusantara III.

6) PAMERAN FOTO

Pameran Foto merupakan suatu kegiatan yang penyajian karya Fotografi dari pewarta foto (fotografer) Bagian Media Cetak dan Media Sosial dan Fotografer yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI sehingga dapat diapresiasi oleh banyak masyarakat. Pameran ini juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan kepada masyarakat luas yang melalui sebuah media karya seni.

Pameran Foto Wartawan Parlemen ke-12 dengan tema “Warna Warni Parlemen XII, Bangkit Lebih Cepat”. Acara berlangsung tanggal 29 Agustus 2022 – 5 September 2022. Pameran Foto dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Pameran foto berlangsung di lobi Gedung Nusantara II DPR

dengan menampilkan sekitar 101 karya foto yang sudah terseleksi. Foto menampilkan kegiatan-kegiatan lembaga legislatif oleh pewarta foto.

7) KEGIATAN IPU KE-144 DI BALI DAN P20 DI JAKARTA

Pada tahun 2022, Indonesia memperoleh kesempatan untuk menjadi tuan rumah *IPU Assembly* ke-144 pada tanggal 20-24 Maret 2022. Melalui kesempatan ini, DPR RI berupaya mengirimkan pesan kuat bahwa parlemen selalu siap menjadi bagian dari solusi untuk memecahkan tantangan dunia yang sedang dihadapi.

Subbagian Media Cetak dan Website melalui tugas, fungsi, sekaligus platform yang dimiliki berupaya mendukung persiapan dan pelaksanaan IPU-144 dari sisi penyediaan informasi yang cepat dan komprehensif.

Subbagian Media Cetak dan Website juga melakukan sosialisasi dan peliputan kegiatan P20 di Jakarta pada 5 s.d. 7 Oktober 2022 dan membantu berbagai aspek kebutuhan peliputan dari media luar, melalui pelayanan pendaftaran ID pers peliputan sidang P20.

Subbagian metakweb bekerja sama dengan BKSAP menyusun pengaturan peliputan selama Sidang P20 berlangsung.

Ketua DPR Buka Sidang IPU ke-144 di Bali, Tekankan Kolaborasi Antar Negara

20-03-2022 /



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam pembukaan Sidang IPU ke-144 di BICC, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022). Foto: Runi/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menekankan konflik



2. SUBBAGIAN MEDIA SOSIAL

Dalam menyusun sasaran kinerja Sub bagian Media Sosial berpatokan kepada akun resmi media sosial DPR RI dengan berbasis kepada viewers/follower/subscriber akun media sosial DPR RI yang bertujuan meningkatkan keterikatan publik terhadap media sosial DPR RI. Media sosial DPR RI yang dikelola yaitu: Twitter, instagram, facebook dan youtube, Tiktok.

Sub Bagian Media Sosial dipimpin Kepala Sub Bagian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 5 orang PNS dan 14 orang PPNPN yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET 2022	CAPAIAN	%
2	Jumlah viewers di akun media sosial DPR RI	10.000.000 viewers	302.679.560 viewers	3.001%

a. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Media Sosial

- Melakukan pemberitaan di media sosial
- Melakukan edukasi tugas dan fungsi kedewanan melalui media sosial
- Membuat konten-konten kedewanan dalam bentuk desain grafis dan video
- Melaksanakan peran kehumasan parlemen di media sosial
- Memudahkan aksesibilitas publik terhadap DPR melalui media sosial
- Melakukan monitoring Media Sosial
- Menyajikan database aktivitas media sosial
- Menyajikan rekam jejak peraturan perundang-undangan di media sosial
- Menganalisis dan meningkatkan traffic media sosial

b. Tujuan DPR RI Menggunakan Media Sosial

Kondisi awal:

- Sentimen publik terhadap DPR RI yang cenderung negatif
- Sulitnya akses publik terhadap DPR

Tujuan DPR menggunakan media sosial:

- Meningkatkan Public Trust terhadap DPR RI.
- Menciptakan lembaga perwakilan yang memiliki kedekatan dengan rakyat.
- Memberikan informasi yang *up to date* terkait dengan DPR.
- Memberikan informasi langsung kepada masyarakat (komunikasi interaktif dan *direct communication*/komunikasi langsung) tanpa melalui media massa sehingga meminimalisir terjadinya bias informasi.
- Membangun hubungan baik dengan masyarakat maupun stake holder lainnya.

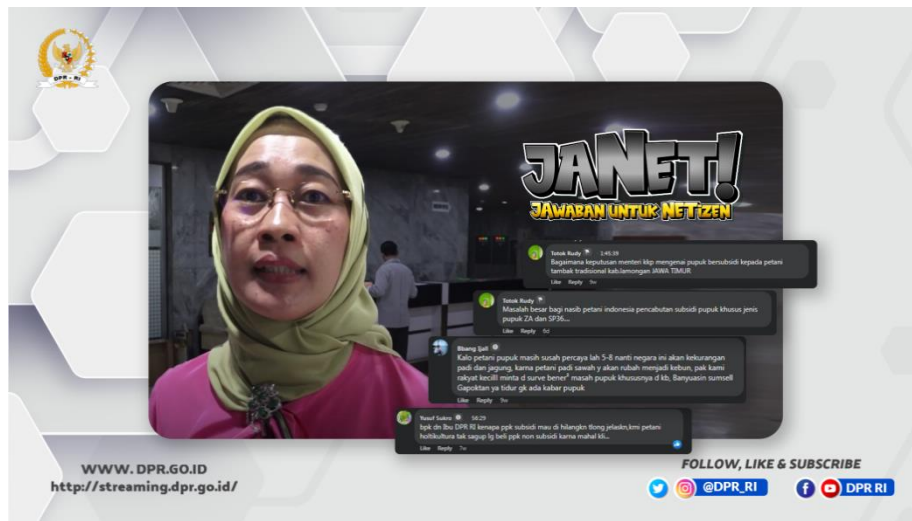
BENTUK KONTEN DAN PROGRAM POSTINGAN MEDSOS DPR RI

a) Program Bincang Bareng Anggota DPR RI



Ini merupakan cover video Program Bincang Bareng Anggota DPR RI yang membahas isu-isu aktual. Konten ini dipublikasikan diseluruh kanal Media Sosial DPR RI yaitu, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok.

b) Program JANET (Jawaban Untuk Netizen)



Ini merupakan cover video Program JANET (Jawaban Untuk Netizen) yang merupakan jawaban dari para Anggota DPR RI terkait pertanyaan-pertanyaan yang di tulis di kanal Media Sosial DPR RI. Konten ini dipublikasikan diseluruh kanal media Sosial DPR RI yaitu, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram.

c) Program KURMA DPR





Ini merupakan cover video Program Kurma DPR yang merupakan program siraman rohani oleh para Anggota DPR RI di bulan suci Ramadan. Konten ini dipublikasikan diseluruh kanal Media Sosial DPR RI yaitu, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok.

d) Program KAKU



Ini merupakan cover video Program Kaku yang mengulas isu-isu aktual disertai dengan report dari pemberitaan di media online. Konten ini dipublikasikan diseluruh kanal media Sosial DPR RI yaitu, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok.

e) Video Kegiatan Kunspek/Kunker AKD



Ini merupakan cover video kegiatan Kunspek/Kunker Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mengulas secara singkat kegiatan tersebut di daerah. Konten ini dipublikasikan diseluruh kanal media Sosial DPR RI yaitu, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok.

f) Program Kongkow Berfaedah






Kongkow Berfaedah



Dyah Roro Esti
 Anggota BKSAP DPR RI

Mengupas Isu Perubahan Iklim
Yang Jadi Bahasan Utama
Sidang IPU ke-144

Sabtu
19 Maret 2022
 15.00 WIB
 16.00 WITA
 17.00 WIT

@DPR_RI X @DYAHROESTIWP


 @DPR_RI DPR RI

g) Desain Ucapan Hari Besar Nasional



SELAMAT HARI
KEBANGKITAN
NASIONAL
20 Mei 2022




 @DPR_RI DPR RI



h) Desain Quote Anggota DPR RI



TOK!
**RUU EBT RESMI JADI
 RUU USUL INISIATIF DPR**

“Paripurna DPR putuskan bahwa RUU Energi Baru dan Terbarukan telah menjadi draf RUU Inisiatif DPR, sembilan fraksi telah setuju agar RUU EBT yang sudah diharmonisasi di Badan Legislatif menjadi draft atau RUU Inisiatif DPR.”

SUGENG SUPARWOTO
 Ketua Komisi VII DPR RI/ F-Nasdem

@DPR_RI DPR RI

i) **Desain Kesimpulan Rapat-Rapat AKD**

**KESIMPULAN RAPAT KERJA
 KOMISI VI DPR RI DENGAN
 KEMENTERIAN BUMN RI**
 SELASA, 20 SEPTEMBER 2022

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan pendapatan mencapai Rp67,75 Triliun dengan laba bersih mencapai Rp15,14 triliun sampai Bulan Agustus 2022, serta mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja produksi dan penjualannya, sehingga target RKAP tahun 2022 dapat tercapai pada akhir tahun
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyusun roadmap industri pupuk nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan data kinerja keuangan dan operasional secara lengkap
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memastikan penyaluran pupuk PSO sesuai dengan tata kelola yang telah ditentukan pemerintah dan mengevaluasi serta menata kembali penyaluran pupuk komersil untuk memastikan ketersediaan pupuk di pasaran.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap harga pupuk Non Subsidi dengan mempertimbangkan efisiensi produksi.

@DPR_RI DPR RI

j) Sosialisasi P20

KICKOFF MEETING P20
 Road to The 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)
 Rabu 15 Juni 2022 | Pukul : 09.30 - 15.30
 JW Marriot Hotel, Surabaya

P20 PRELIMINARY DISCUSSION
 Road to The 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)
 Rabu 15 Juni 2022 | Pukul : 09.30 - 12.00 WIB
 JW Marriot Hotel, Surabaya

NARASUMBER:

MODERATOR:

Airlangga Hartarto
 Sherpa G20/
 Menteri Koordinator
 Bidang Perekonomian

Dr. (HC) Puan Maharani
 Ketua DPR RI

Duarte Pacheco
 Presiden
 Inter-Parliamentary
 Union

Arief Anshory Yusuf
 Guru Besar FEB UNPAD

I Gede Wahyu Wicaksana
 Dosen dan Peneliti Senior
 Bidang Ekonomi Politik
 Internasional, FISIP,
 Universitas Airlangga

Puto Supomo Rudono
 Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen,
 Anggota Komisi X

@DPR_RI

k) Dorstop Isu-Isu Aktual

TB ACE HASAN SYADZILY
BERIKAN RESPON TERKAIT
KUOTA HAJI INDONESIA

@DPR_RI

PEMEKARAN
DAERAH OTONOM BARU (DOB) PAPUA

@DPR_RI

l) Sosialisasi IPU 144 di Bali



Hal Ini merupakan cover video doorstep isu-isu aktual dari Pimpinan dan Anggota DPR RI. Konten ini dipublikasikan diseluruh kanal media Sosial DPR RI yaitu, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok.

m) Desain Sosialisasi Prolegnas

The infographic is divided into two columns, each representing a year: 2020 and 2021. Each year lists several bills that have been completed for discussion by the House of Representatives. The bills include:

- 2020:**
 - Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Bea Material (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Service under the ASEAN Framework Agreement (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (PEMERINTAH)
- 2021:**
 - RUU tentang Pengesahan Persejukan Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) (PEMERINTAH)
 - RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Sisa Dampak Lainnya Menghimpun Anggaran yang Mendekatkan Prioritasnya dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Partisipasi Masyarakat dan Batu Bara (DPR)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persejukan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) (PEMERINTAH)
 - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (DPR)

Social media handles for DPR RI are provided at the bottom of each column.

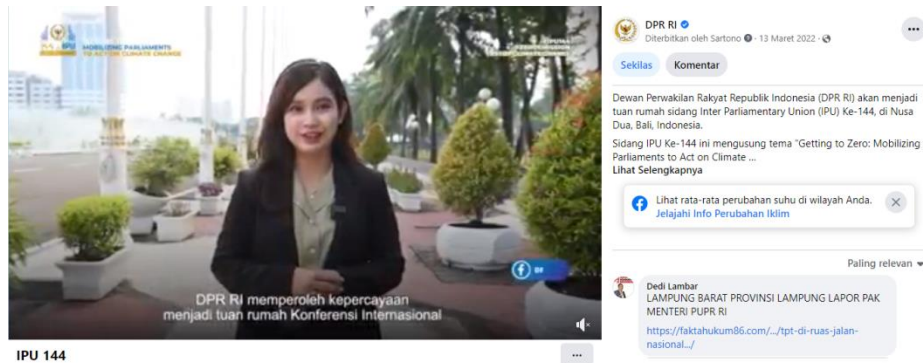
n) Siaran Langsung Raker/RDP/RDPU DPR RI

The first screenshot shows a YouTube live stream titled "SAKSIKAN SIARAN LANGSUNG RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-9 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023, Selasa, 2 November 2022 | Pukul 13.00 WIB". The agenda includes the opening speech by the Speaker of the House and the inauguration of interim members for the 2019-2024 term.

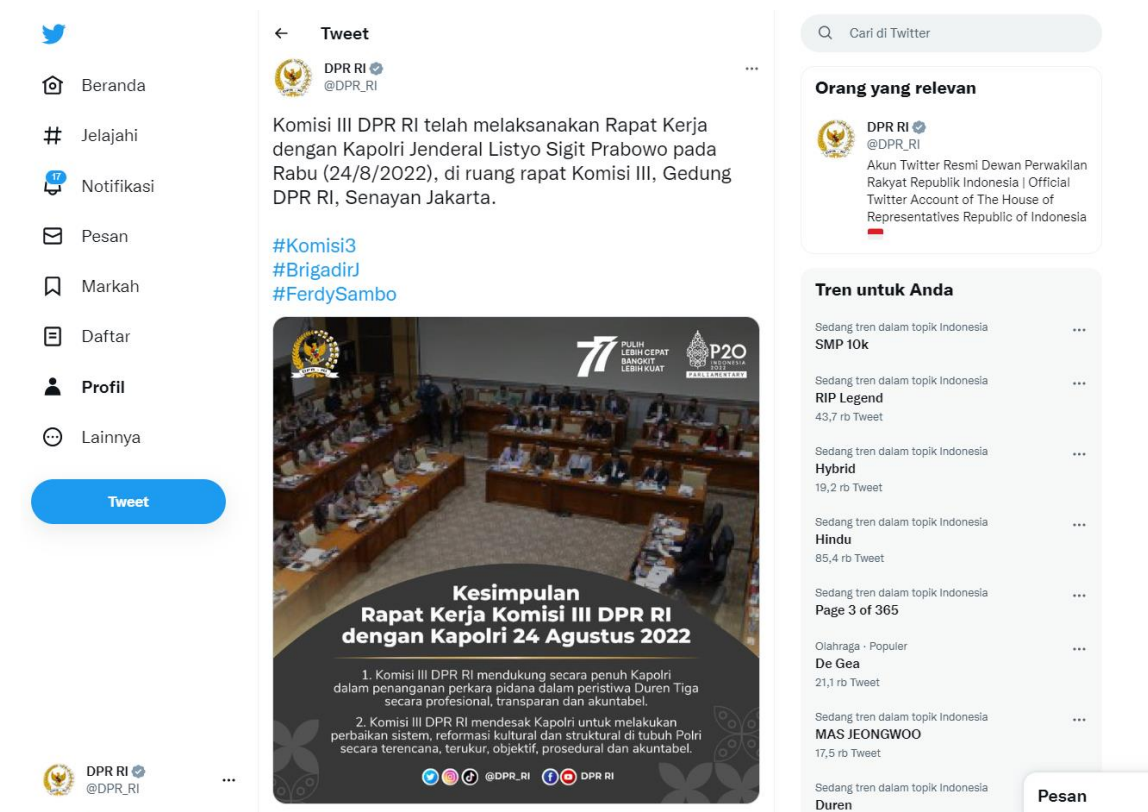
The second screenshot shows a YouTube live stream titled "PARLIAMENTARY FORUM IN THE CONTEXT OF THE G20 PARLIAMENTARY SPEAKER'S SUMMIT (P20) [INDONESIA]". The event features remarks from Indonesian representatives and a panel discussion on the role of parliaments in international cooperation.

Di atas merupakan beberapa sebagai program dan bentuk materi konten postingan Media Sosial DPR RI dalam bentuk video maupun desain grafis.

o) Postingan Sosialisasi IPU 144 Bali di Facebook DPR RI



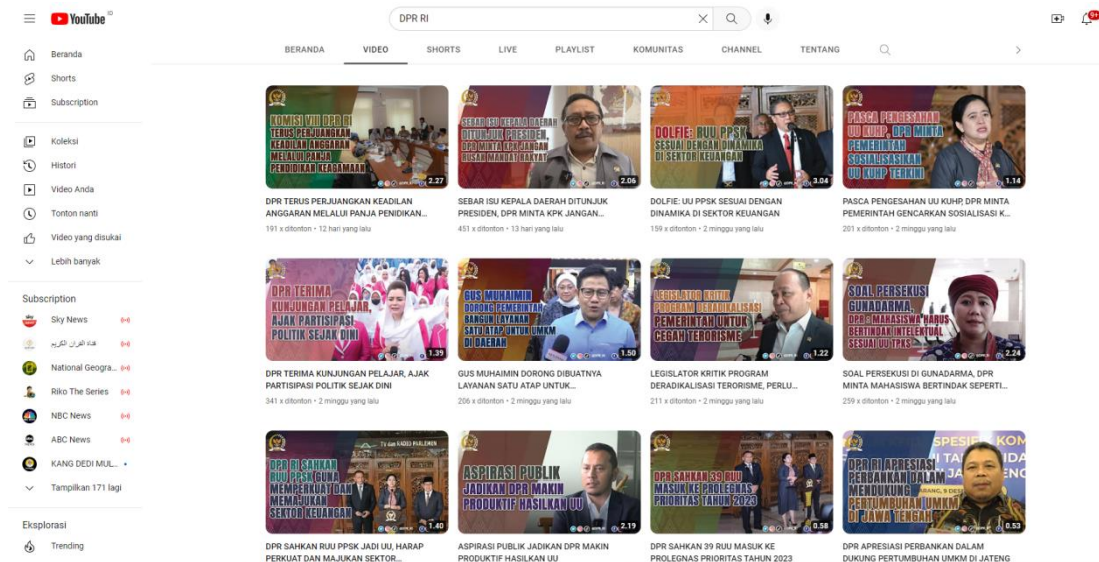
p) Postingan Kesimpulan Rapat di Twitter DPR RI



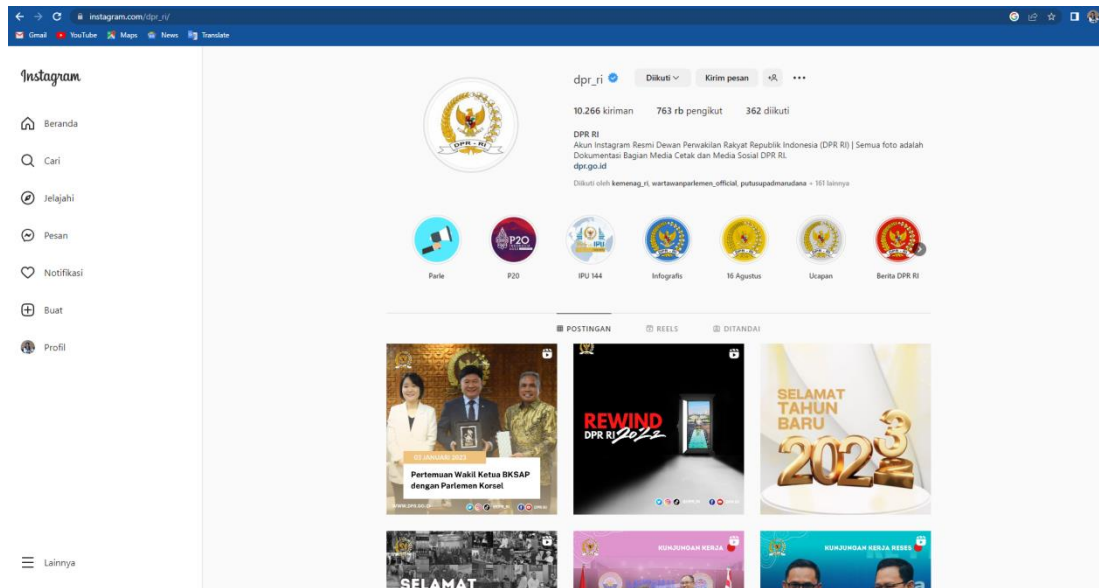
q) Postingan P20 di Tiktok DPR RI



r) Postingan Dorstop Isu di Youtube DPR RI



s) Postingan di Instagram DPR RI



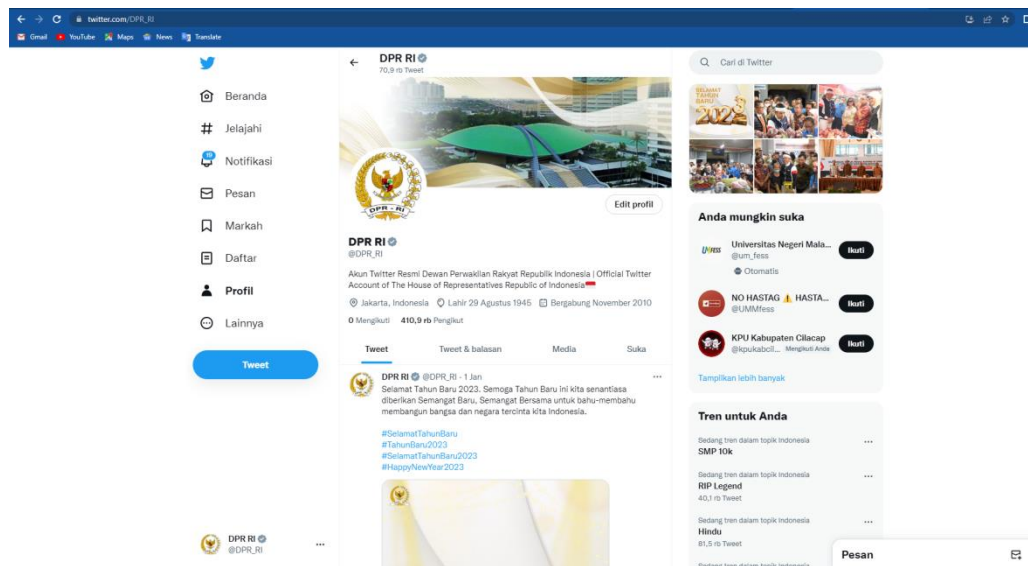
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

- Memaksimalkan pengalaman kekuatan internal DPR RI yang bergerak di dunia media sosial. Diantaranya: Unsur Tenaga Ahli Komisi, Fraksi dan Tenaga Ahli Anggota yang mengelola media sosial.
- Memaksimalnya pemanfaatan potensi media sosial DPR RI diantaranya dengan dalam setiap pameran yang diikuti oleh DPR RI disertakan informasi tentang Media Sosial.
- Memaksimalnya dukungan kelembagaan terhadap kemungkinan pengembangan potensi media sosial DPR RI diantaranya mengembangkan berbagai program dengan bekerjasama dengan berbagai unit yang terkait seperti Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Bagian TV Parlemen, Bagian Penerbitan.
- Memaksimalkan penanganan pengaduan melalui media sosial DPR RI.
- Memaksimalkan kerjasama eksternal dengan berbagai pihak yang memiliki kekuatan besar di dunia media sosial dan media online
- Program sosialisasi kinerja DPR RI melalui Media Sosial DPR RI.
- Sosialisasi Akun media sosial melalui pencetakan berbagai sticker dan atribut lain untuk diberikan kepada netizen dalam berbagai event.

- Penguatan *feeder* antara lain dengan cara feeder tidak hanya terbatas pada jurnalis Media Cetak dan Media Sosial melainkan juga di AKD maupun dalam Tim-tim RUU maupun Tim pengawasan mengingat Media sosial DPR RI memerlukan kecepatan & akurasi dalam memberikan informasi. *Feeder* sumber informasi utama dari media sosial DPR. *Feeder* yang paling memahami substansi/agenda yg dibahas dalam rapat-rapat DPR.
- Melakukan siaran langsung rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan DPR RI di media sosial DPR RI secara rutin terhadap tugas dan fungsi DPR RI.

GAMBARAN UMUM MEDIA SOSIAL DPR RI

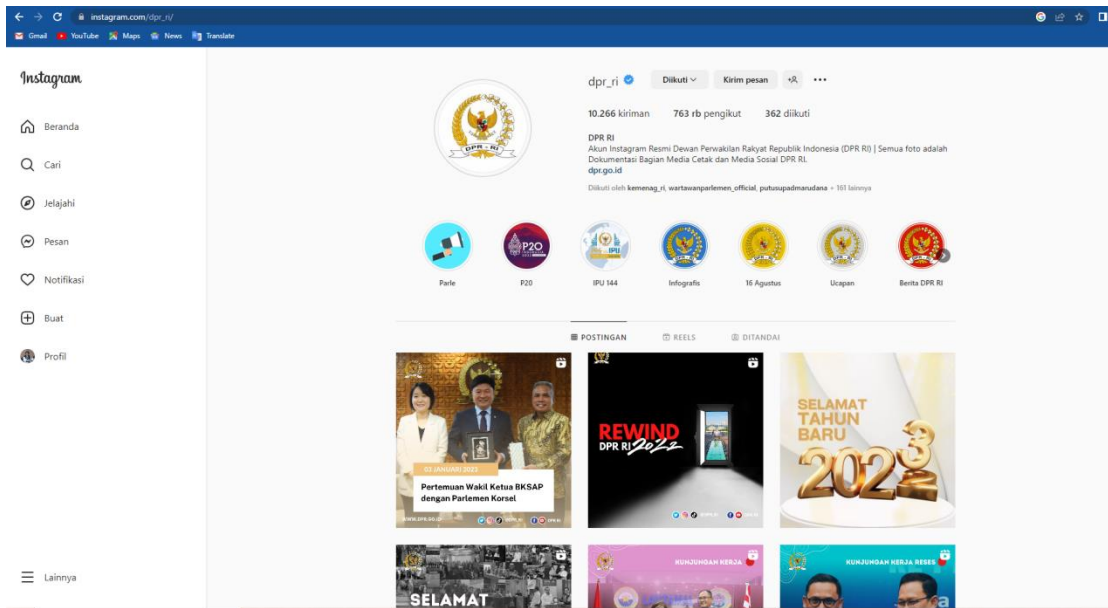
TWITTER @DPR_RI



Diakses, tanggal 4 Januari 2023, Pukul 09:00 WIB

Jumlah Follower Akun Resmi Twitter @DPR_RI sebanyak 410.974 Followers. Selama Tahun 2021, ada **9.341 postingan**.

INSTAGRAM @DPR_RI



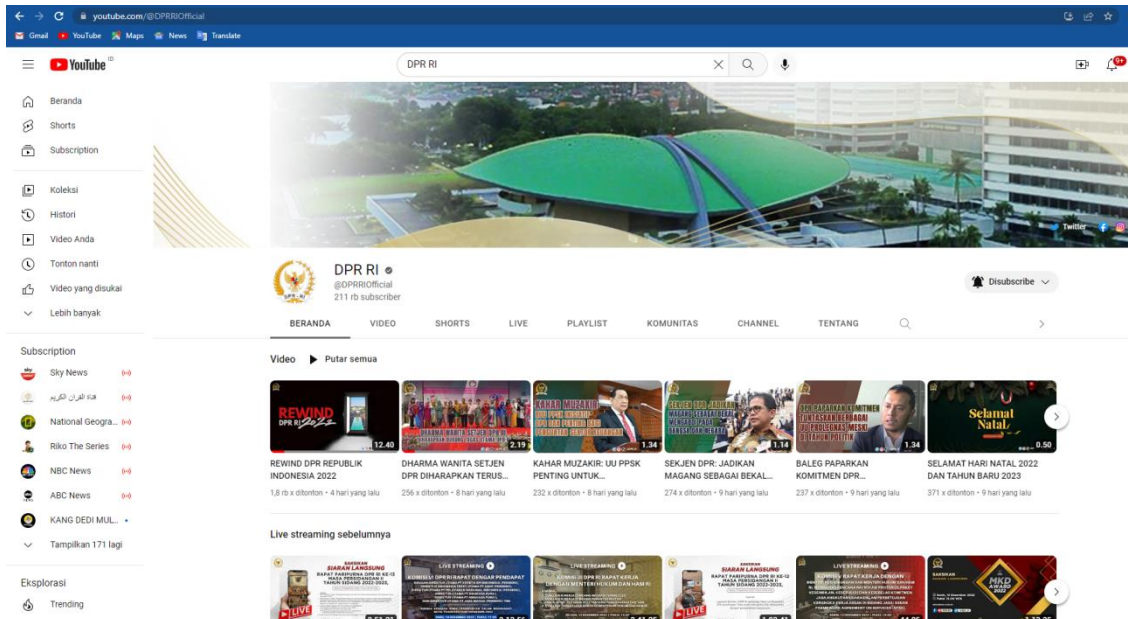
Jumlah Follower Akun Resmi Instagram @DPR_RI tanggal tanggal 4 Januari 2023, Pukul 09:00 WIB, berjumlah 763.059 Followers/Pengikut dengan Following 362 dan Posts: **2.763 postingan**.

FACEBOOK DPR RI



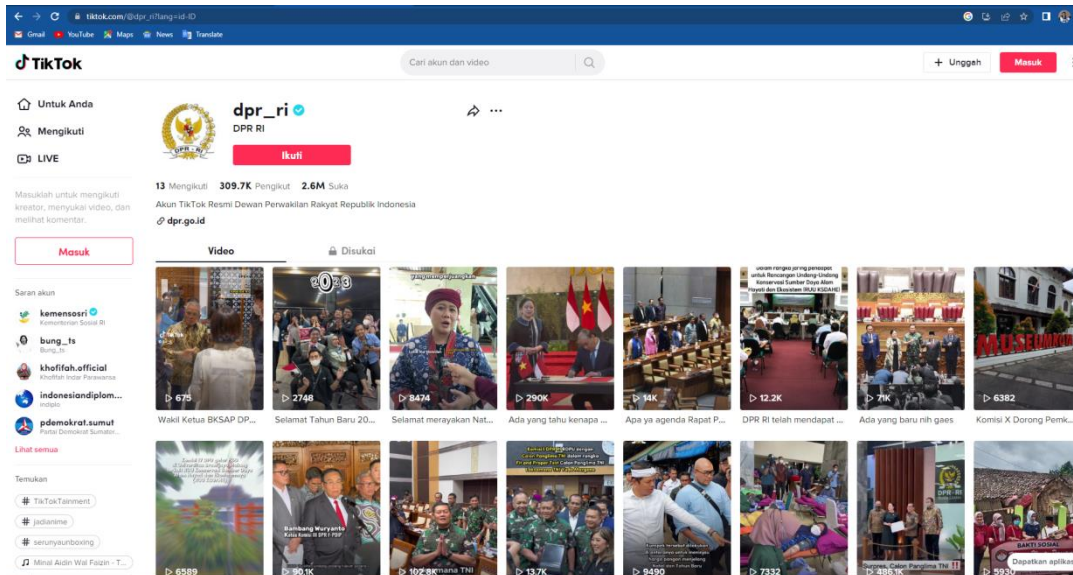
Jumlah Follower Akun Resmi Facebook @DPR_RI tanggal 4 Januari 2023, Pukul 09:00 WIB, 632.035 Follower dan 51 Following. Fanpage Facebook DPR RI melakukan siaran langsung rapat-rapat dan kegiatan DPR RI yang telah ditentukan, seperti siaran Paripurna DPR RI dan rapat-rapat AKD.

YOUTUBE DPR RI



Diakses, tanggal 4 Januari 2023, Pukul 09:00 WIB, Subscriber: 211.000, Jam Tayang : 26.201.743 x ditonton

TIKTOK DPR RI



Diakses, tanggal 4 Januari 2023, Pukul 09:00 WIB, Followers: 309.850, Like: 2.623.664 dan Following: 13 Following.

PANDUAN TIM MEDIA SOSIAL DPR RI

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Media Sosial yaitu:

- a) Bahwa akun sosial media DPR RI mewakili kelembagaan DPR RI.
- b) Bahwa akun sosial media DPR RI didirikan dan diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan dengan tujuan untuk: menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara DPR RI dengan masyarakat & mewujudkan akun sosial media yang mampu menghasilkan reputasi DPR RI yang semakin baik.
- c) Bahwa pengelolaan akun sosial media DPR RI harus berkesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada termasuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
- d) Bahwa SOP media sosial DPR sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomer 703/SEKJEN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- e) Bahwa DPR RI merupakan lembaga politik sehingga pengelolaan akun sosial medianya memiliki kompleksitas yang lebih bila dibanding dengan pengelolaan akun sosial media kelembagaan lainnya sehingga memerlukan kehati-hatian lebih dalam pengelolaanya.
- f) Bahwa DPR RI terdiri dari berbagai kepentingan politik sehingga dalam penyampaian informasinya memerlukan kehati-hatian dan kebijakan dalam kerangka NKRI.

Hashtag Baku Media Sosial DPR RI

1. #KunkerDPR
2. #DiplomasiDPR
3. #edupolDPR
4. #PengawasanDPR
5. #LegislasiDPR
6. #Komisi1 s.d. #Komisi11 dan Hashtag Badan-Badan

7. #SidakDPR
8. #ParipurnaDPR
9. #TimwasDPR
10. Dan hashtag (#) yang sifatnya situasional

Hashtag (#) fungsinya untuk memilah tweet berdasarkan topik sehingga tidak bersifat baku & dimungkinkan sesuai dengan tuntutan isu yang berkembang dimunculkan hashtag baru yang dapat pula diharapkan dapat menjadi trending topic.

Kegunaan Hashtag untuk mengelompokkan sebuah topik ataupun memberikan sebuah kategori tertentu. Hashtag juga dapat menjelaskan suatu tweet, menggabungkan beberapa tweet agar selaras (dalam kultwit). Menarik dan mengundang perhatian orang terhadap satu bahasan tertentu contoh: #akurapopo. Hashtag juga dapat menjadi “bumbu” agar tweet lebih lucu seperti #eeeea tapi tentu untuk lembaga tidak dipergunakan.

ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN MEDIA SOSIAL DPR RI

- Mengingat Media Sosial ini merupakan akun lembaga Negara, maka apa yang dipublikasikan dimaksimalkan menggunakan bahan atau data yang sudah menjadi kebijakan atau keputusan.
- Masih mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam memperoleh dan mengakses bahan-bahan untuk medsos.
- Kendala teknis seperti akses jaringan internet masih menjadi kendala utama.
- Diharapkan penguatan *feeder* yang tidak hanya terbatas memberikan foto saja tapi mampu memberikan informasi sejelas-jelasnya.
- Perlunya *feeder* di AKD maupun dalam Tim-tim RUU maupun Tim pengawasan mengingat terutama pada masa persidangan banyaknya agenda yang tersebar di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Media sosial DPR RI memerlukan kecepatan & akurasi dalam memberikan informasi. *Feeder* sumber informasi utama dari media sosial DPR. *Feeder* yg paling memahami substansi/ agenda yg dibahas dlm rapat2 DPR.

- Kebijakan Pengembangan Media Sosial di DPR RI, sebaiknya dalam setiap publikasi Kesetjenan maupun Kedewanan selalu memnyertakan logo-logo Media Sosial DPR RI.

TABEL 7
PENETAPAN KINERJA MEDSOS

Sasaran strategis	Indikator utama	Target
1	2	3
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberitaan terkait fungsi legislasi	Persentase pemberitaan di media online dan media sosial serta grafik pembaca dari berita tersebut	100%
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberitaan terkait fungsi pengawasan	Persentase pemberitaan di media online dan media sosial serta grafik pembaca dari berita tersebut	100%
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberitaan terkait fungsi anggaran	Persentase pemberitaan di media online dan media sosial serta grafik pembaca dari berita tersebut	100%
4. Meningkatnya engagement dan trust (kepercayaan) terhadap pemberitaan DPR RI	Persentase pemberitaan di media online dan media sosial serta grafik pembaca dari berita tersebut serta hasil analytic tools	100%
5. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dengan melakukan studi banding ke beberapa daerah.	Persentase kegiatan studi banding	100%
6. Meningkatnya pengetahuan dasar media sosial	Persentase mengikuti kegiatan diskusi dengan pakar	100%

3. SUBBAGIAN ANALISIS MEDIA

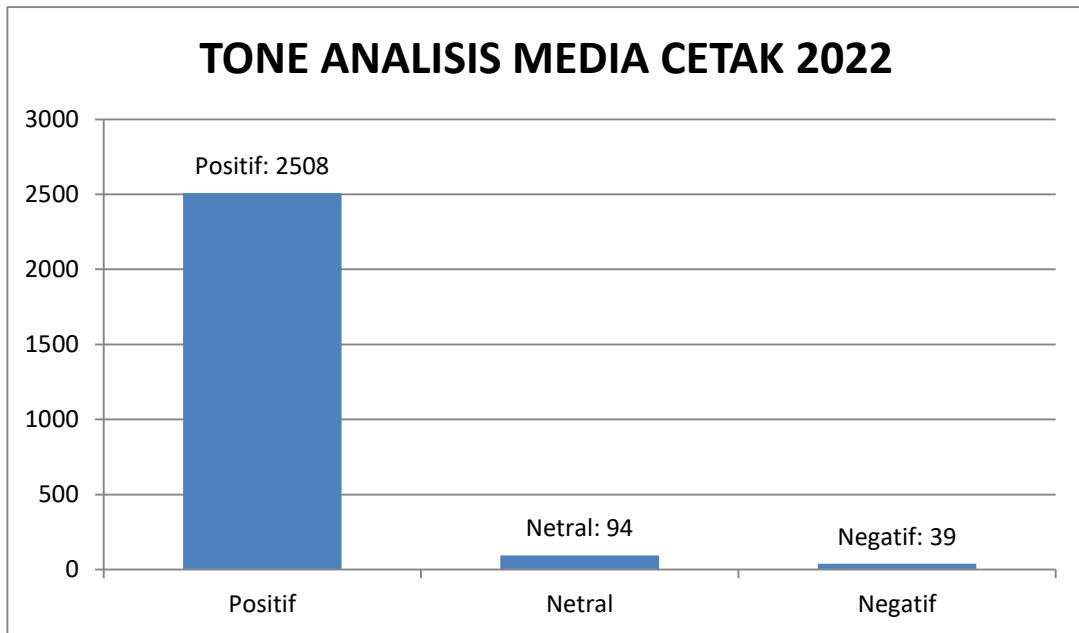
TABEL 8
PENGUKURAN KINERJA ANALISIS MEDIA

SASARAN	INDIKATOR UTAMA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Terlaksananya program dan kegiatan media sosial	Jumlah dokumen analytic tools	4 media sosial, DPR dan media online	4 media sosial DPR dan media online	100%
Terlaksananya kegiatan studi banding analisis media.	Jumlah kegiatan studi banding	4 kegiatan	4 kegiatan	100%

Selain melaksanakan kegiatan di media cetak, media sosial dan website, Bagian Media Cetak dan Media Sosial juga melakukan kegiatan analisis media. Kegiatan analisis media ini adalah untuk memonitoring pemberitaan DPR di media cetak dan media online, untuk mengetahui isu setting dan framing media cetak dan online, serta tone pemberitaan DPR di media cetak dan media sosial. Kegiatan analisis media tersebut, terdiri dari :

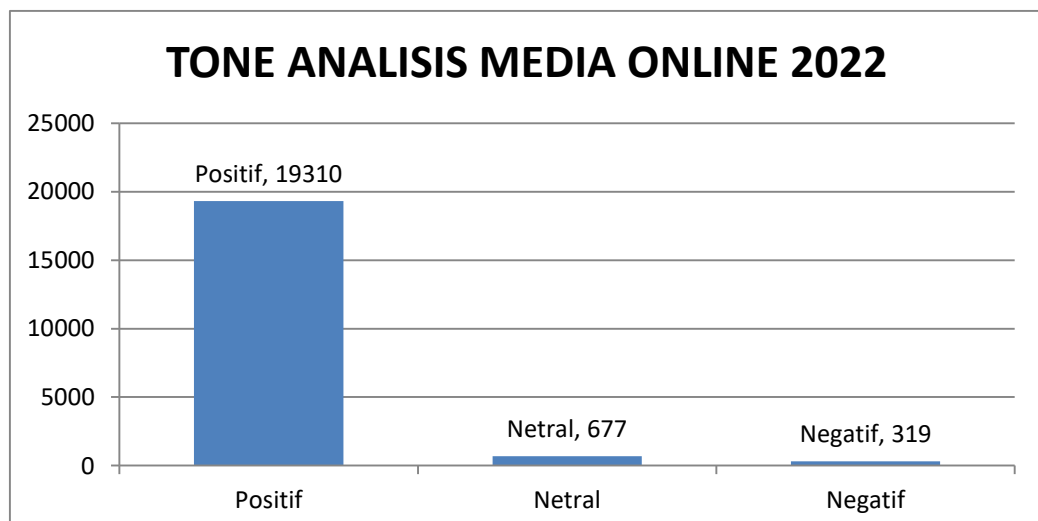
1. Analisis Media Cetak

- a. Kegiatan menganalisis pemberitaan terkait DPR RI di media cetak untuk mengetahui isu terkait pemberitaan DPR di media cetak, serta bagaimana implikasi dan pengaruhnya terhadap DPR.
- b. Jumlah Media: 8
- c. Nama media: Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Koran Jakarta, Republika, Kontan, Rakyat Merdeka, dan Koran Sindo
- d. Perhari rata-rata: 7 analisis berita
- e. Rekapitulasi jumlah analisis media cetak selama tahun 2022 sebanyak 2.641 analisis.

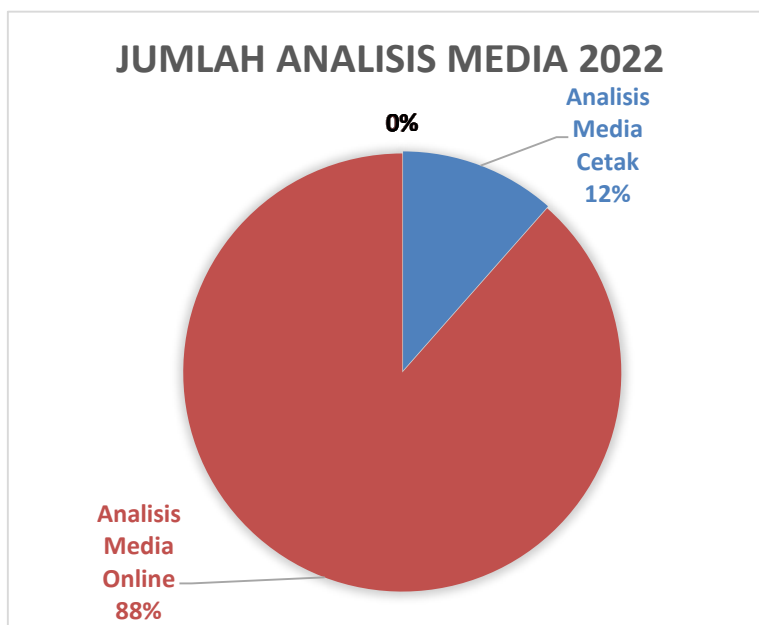


2. Analisis Media *Online*

- a. Kegiatan menganalisis pemberitaan terkait DPR RI di media *online* untuk mengetahui isu terkait pemberitaan DPR di media *online*, serta bagaimana implikasi dan pengaruhnya terhadap DPR.
- b. Jumlah media: 12.
- c. Media online: Detikcom, Antaranews, Viva.co.id, RMOL.id, Republika.co.id, CNN Indonesia, Liputan6.com, Tribunnews.com, Kumparan.com, Kompas.com, Tempo.co, dan Suara.com.
- d. Perhari rata-rata : 57 analisis berita.
- e. Rekapitulasi jumlah analisis media online selama tahun 2022 sebanyak 20.306 analisis.



Grafik Jumlah Hasil Analisis Media 2022



3. Ikhtisar Berita

- Merupakan rangkuman dari hasil analisis media cetak dan media online yang sudah dikategorikan berdasarkan isu dan tone berita
- Ikhtisar berita Media Cetak dan Media Online.
- Perhari rata-rata: 60 ikhtisar berita.
- Rekapitulasi jumlah Ikhtisar berita selama tahun 2022 sebanyak 14.400 ikhtisar berita.
- Pengiriman Ikhtisar Berita.*

4. Rekomendasi Isu Aktual

- Penyusunan rekomendasi isu aktual maupun isu berkembang yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran yang perlu direspon oleh Pimpinan dan Anggota DPR
- Rekomendasi isu aktual dari media cetak, media online, maupun media siaran.
- Perhari rata-rata : 4 s.d. 6 rekomendasi isu aktual.
- Rekapitulasi jumlah rekomendasi selama tahun 2022 sebanyak 916 rekomendasi.
- Pengiriman Rekomendasi Isu Aktual.*

***Pengiriman Ikhtisar Berita dan Rekomendasi Isu Aktual** (Hasil Analisis Media) melalui Email, chat Whatsapp, dan SMS Gateway

5. Kliping Digital

- a. Kegiatan mengkliping pemberitaan terkait tugas dan fungsi DPR RI di media cetak, yang disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan.
- b. Kliping Digital Berita DPR di Media Cetak Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Koran Jakarta, Republika, Kontan, Rakyat Merdeka, dan Koran Sindo.
- c. Perhari rata-rata: 7 kliping digital

6. Usulan Isu Harian

- a. Memberikan usulan isu harian untuk media internal DPR kepada: Redaktur Media Cetak, Redaktur Media Sosial, Kasubbag Media Cetak, Kasubbag Media Sosial, dan Kasubbag TV Parlemen;
- b. Usulan isu harian merupakan pilihan isu-isu aktual yang menjadi *concern* dan memiliki urgensi tinggi untuk dibahas oleh DPR RI.

7. Rekapitulasi Berita Presiden Joko Widodo di Media

- a. Rekapitulasi berita terkait Presiden Joko Widodo di media cetak, online, dan siaran.
- b. Perhari rata-rata : 7 rekapitulasi berita Presiden Joko Widodo.

8. Proyeksi Isu di Media

- a. Proyeksi isu yang berpotensi muncul di media cetak, media online, maupun media siaran berdasarkan berita terkait Presiden Joko Widodo.
- b. Perhari rata-rata : 5 proyeksi isu

9. Agenda Setting dan Manajemen Isu

- a. Agenda Setting :
Kegiatan untuk menetapkan isu sepekan bagi media internal DPR (Media Cetak, Media Sosial, Website, TV Parlemen, dan Radio Parlemen) guna mewujudkan orkestrasi (kesamaan) isu di media internal DPR RI dengan berpedoman kepada hasil manajemen isu.
- b. Manajemen Isu :

- Rekapitulasi Isu pemberitaan DPR pada Media Cetak dan Media Online selama satu minggu;
 - Tendensi Berita DPR di Media Cetak dan Media Online selama satu minggu;
 - Faktor Eksternal: hot issues di media cetak, hot issues di media online, hot issue di media sosial, dan editorial media cetak;
 - Faktor Internal: kegiatan tugas dan fungsi DPR yang telah dan sedang dilaksanakan dalam periode waktu satu minggu.;
 - Memprediksi potensi isu berlanjut dan isu baru yang akan diangkat media;
- c. Rapat dilaksanakan setiap Jumat, baik secara offline maupun online, dihadiri Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Media Cetak dan Media Sosial, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian TV Radio Parlemen, Redaktur Medtaksos, dan Redaktur TV Radio Parlemen.

10. Diseminasi Informasi

Diseminasi Informasi dilaksanakan dalam rangka menjaring informasi dan data terkait pengelolaan media dan monitoring isu yang dilakukan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang memiliki kegiatan yang sama, memiliki inovasi dan mendapatkan penghargaan dari kegiatannya tersebut. Tahun 2022, Bagian Media Cetak dan Media Sosial melakukan diseminasi informasi antara lain ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru Kota Medan, DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kantor Redaksi Surat Kabar Jawa Pos Provinsi Jawa Timur, Kantor Pusat Syiar Digital Muhammadiyah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kantor Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

a. **Diseminasi Informasi ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru, Kota Medan**

Tanggal: 28 Februari s.d. 2 Maret 2022

Lokasi: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru

Hasil Kegiatan:

Dari hasil pertemuan dan diskusi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa, setiap kantor pemerintahan, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi mempunyai kebutuhan akan tenaga terampil dibidang komunikasi untuk menangani berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik, agar image DPR maupun DPRD tetap terjaga dengan baik di mata publik. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada.



Foto 1: Kegiatan Diseminasi Informasi Ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru, 28 Februari 2022

b. Diseminasi Informasi ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kantor Redaksi Surat Kabar Jawa Pos

Tanggal: 2 s.d. 4 Juni 2022

Lokasi: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kantor Redaksi Surat Kabar Jawa Pos

Hasil Kegiatan:

Dari hasil pertemuan dengan Sekretariat DPRD Jawa Timur Bagian Perundang-undangan, Sub Bagian Data dan Publikasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan media sebagai bentuk pelayanan sekwan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan pola kerja sama. Misalnya pada proses peliputan kegiatan sidang paripurna, selain personil dari internal Subbagian Data dan Publikasi, peliputan juga melibatkan wartawan eksternal yang berasal dari Kelompok Kerja (Pokja) dari 12 media rekanan yang telah bekerja sama. Kemudian untuk pantauan isu atau media monitoring bekerja sama dengan Indonesia Indikator.





Foto 2: Kegiatan Diseminasi Informasi ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kantor Redaksi Surat Kabar Jawa Pos, 2 Juni 2022

c. Diseminasi Informasi ke Kantor Pusat Syiar Digital Muhammadiyah Provinsi D.I Yogyakarta

Tanggal: 23 s.d. 25 September 2022

Lokasi: Kantor Pusat Syiar Digital Muhammadiyah

Hasil Kegiatan:

Dari hasil pertemuan dan diskusi dengan Direktur Pelaksana Pusat Syiar Digital Muhammadiyah (PSDM), Arif Nur Kholis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan media monitoring di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dilaksanakan menggunakan bantuan mesin analisis dari Astramaya. Adapun penentuan isu (agenda setting) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah besar antara pimpinan pusat dengan pengurus pimpinan cabang dan ranting di daerah. Hal serupa juga dilakukan jika terdapat isu miring atau isu negatif tentang PP Muhammadiyah. Hasil musyawarah besar tersebut kemudian disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga kemudian menjadi suara satu-satunya yang dijadikan acuan bagi seluruh kader Muhammadiyah. Satu kelebihan yang dimiliki oleh PSDM Muhammadiyah adalah memiliki ruang *command center* yang berfungsi untuk tempat koordinasi dan konsolidasi seluruh pengurus Muhammadiyah dari level ranting hingga level pusat.



Foto 3: Kegiatan Diseminasi Informasi ke Kantor Pusat Syiar Digital Muhammadiyah Provinsi D.I Yogyakarta, 23 September 2022

d. Diseminasi Informasi ke Kantor Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Tanggal: 8 – 10 Desember 2022

Lokasi: Kantor Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Jawa Tengah

Hasil Kegiatan:

Dari hasil pertemuan dan diskusi dengan Subbagian Komunikasi dan Pimpinan (Kompim) Sekretariat Daerah Kota Surakarta, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan analisis media yang dilakukan oleh Subbagian Analisis Media Sekretariat Jenderal DPR RI sudah berjalan sesuai dengan program. Adapun yang menjadi program kerja di Subbagian Kompim Sekda Kota Surakarta antara lain program

kegiatan kemasyarakatan (pembuatan iklan layanan masyarakat, dialog interaktif radio dan tv yang bekerjasama dengan media tradisional), media gathering, pers conference, siaran online, pengelolaan website, dan liputan kegiatan pimpinan (walikota). Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja Subbagian Kompim Sekda Kota Surakarta khususnya dalam pengelolaan website dan pemberitaan pimpinan, Subbagian Kompim Sekda Kota Surakarta berharap bisa belajar dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, agar sistem kerja di Subbagian Kompim Sekda Kota Surakarta dapat lebih dinamis dan inovatif.



Foto 4: Kegiatan Diseminasi Informasi Ke Kantor Sekretariat Daerah Kota Surakarta, 8 Desember 2022

e. *Workshop Analisis Media*

- a) Tema: “In-Depth Analisis Pemberitaan DPR RI dalam Strategi Peningkatan Efektivitas Informasi bagi Dewan”
- b) Tanggal: 17 s.d. 19 Juni 2022
- c) Narasumber:
Senior Analis Yan Kurniawan, Media Analis Rizal Nova Mujahid
- d) *Workshop* dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pembahasan materi terkait pengenalan dasar-dasar analisis berita yang mana terdiri dari: Landasan Konseptual terkait analisis berita, Media Landscape, Mengenal analisis Media, dan Strategi Pemanfaatan. Sesi kedua pembahasan terkait Topics Map Umum & DPR, Pemilihan Isu, Kliping.



Foto 6: Kegiatan *Workshop Analisis Media*, 17 s.d. 19 Juni 2022

f. *Workshop Analisis Media*

- a) Tema: “In-Depth Analisis Pemberitaan DPR RI dalam Strategi Peningkatan Efektivitas Informasi bagi Dewan”
- b) Tanggal : 19 s.d. 21 Agustus 2022
- c) Narasumber:
Senior Analis Yan Kurniawan

- d) *Workshop* dilaksanakan sebagai tindak lanjut kegiatan workshop pada tanggal 17 – 19 Juni 2022 yang berfokus pada pembuatan isu rekomendasi dan ikhtisar berita.



Foto 7: Kegiatan Workshop Analis Media, 19 – 21 Agustus 2022

B. BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN

TV Parlemen memulai siaran pada 8 Januari 2007, setiap Senin s.d. Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 20.00 WIB. Seiring dinamika media sosial yang semakin meningkat mulai 29 Agustus 2018 TV Parlemen dapat diakses melalui aplikasi DPR Now kemudian pada media sosial lainnya seperti youtube, instagram, dll. Siaran TV Parlemen juga dapat ditonton melalui video streaming internet <http://tvrparlemen.dpr.go.id> Parlemen dan TV berbayar First Media. Saat ini, TV Parlemen mengelola siaran persidangan dari ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ini seperti memiliki 14 studio produksi digital sendiri (11 studio di masing-masing komisi, 2 ruang rapat paripurna dan studio utama di Gedung Nusantara 4).

Radio Parlemen memulai siaran perdananya pada 4 Februari 2017 lewat jaringan internet <http://tvr.dpr.go.id/radio> dan melalui aplikasi Spotify, google podcast, apple podcast. Waktu siaran Radio Parlemen saat ini adalah pukul 08.00 s.d. 20.00 WIB.

Tugas Fungsi TVR Parlemen

- Meliput dan menyiarkan seluruh kegiatan Pimpinan, Anggota DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI baik dalam persidangan maupun di luar sidang.
- Menjadikan berita TVR menjadi sumber rujukan informasi keparlemenan bagi televisi dan radio lainnya di tanah air.
- Menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung (*taping*) seluruh kegiatan di Komisi dan Alat kelengkapan Dewan lainnya
- Membangun citra dewan lewat beragam produk siaran lain seperti spot iklan, feature, dokumenter, talkshow, dll, sehingga pemahaman publik terhadap kinerja dewan semakin baik.
- Menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi dewan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam bentuk audio video.
- Melakukan kerjasama penyiaran dengan TV dan Radio baik swasta nasional maupun publik.

TABEL 9**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022**

INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	OUTCOME
Terwujudnya peliputan dan pemberitaan mengenai kegiatan DPR RI, Setjen DPR RI melalui media televisi dan radio secara akurat dan mudah diakses masyarakat.	Dua Paket Kegiatan: 1. Sosialisasi fungsi dan tugas dan kinerja anggota Dewan melalui penayangan dialog interaktif/talkshow/liputan TV dan radio Parlemen di media elektronik 2. Penyelenggaraan kegiatan pemberitaan TVR Parlemen DPR RI	100 persen	Presentase berita DPR RI yang didistribusikan dan direspon terkini, akurat dan tepat waktu melalui media massa sehingga masyarakat dapat memahami DPR RI secara lebih komprehensif

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022 seperti tergambar pada tabel 9, TVR Parlemen di samping mengelola siaran secara berkesinambungan juga menyiapkan konten siaran yang dikelola sesuai dengan kaidah jurnalistik televisi dan radio (*Content Provider*).

Konten berisikan informasi tentang dinamika kinerja dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dibidang legislasi, anggaran maupun pengawasan.

Memfaatkan anggaran Sosialisasi Fungsi, Tugas dan Kinerja Anggota Dewan melalui Media Elektronik, TVR Parlemen membangun kerja sama penyiaran sejumlah paket program siaran dengan media televisi yaitu TVRI, TVone, RCTI, Global TV, Mnc TV, InewsTV, CNN Indonesia, Trans TV dan Trans 7, Kompas TV, Berita satu, SCTV, Indosiar, Antara TV dan Metro TV.

Sementara media radio yang menjadi mitra Radio Parlemen adalah RRI Pro3 Nasional, Radio SindoTrijaya FM, Kantor Berita Radio 68H, Radio Sonora, Radio Elshinta dan sejumlah radio lokal.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET 2022	CAPAIAN	%
1	Jumlah pemirsa/ pendengar/ penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI	348 Juta	621 Juta	178%

Sepanjang tahun 2022 lalu TVR Parlemen telah berhasil mencapai target jumlah penonton dan pendengar. Hal ini berhasil dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah televisi dan radio yang menjadi mitra kerja.

**TABEL AUDIENCE SHARE
TVR PARLEMEN TAHUN 2022**

TELEVISI	
Media Mitra	Jumlah Penonton
KOMPAS TV	4.010.874
TV ONE	7.700.000
METRO TV	1.162.151
CNN INDONESIA	4.486.905
INEWS	3.171.618
TVRI	528.396.000
RADIO	
Media Mitra	Jumlah Pendengar
SONORA	23.972.640
KBR	14.895.000
ELSHINTA	7.330.000
MNCTRIJAYA	4.085.000
RRI	7.700.000
Media Pendukung	Jumlah Viewer
YOUTUBE TVR PARLEMEN	405.889
MEDIA LOKAL	10.750.697
RELAY AKUN DPR RI	3.480.142
Jumlah Total: 621.546.916	

TVR Parlemen juga berhasil membangun komunikasi dengan televisi dan radio lokal di sejumlah daerah di tanah air. Tahun 2022 berlangsung di Indramayu dan Malang dalam pertemuan yang dikemas sehari penuh. Kegiatan lokakarya menjadi pintu kerja sama sinergi menyebarkan konten yang dihasilkan Radio Parlemen ke daerah.

Selain itu, TVR Parlemen juga menggelar kegiatan TVR Days di UIN Jakarta dan Universitas Padjajaran sebagai langkah edukasi untuk memperkenalkan TVR Parlemen kepada khalayak kampus atau *civitas academica*.

Kerja sama dengan media swasta dan kampus ini mempertegas peran TVR Parlemen sebagai *content provider* bagi televisi dan radio baik publik, swasta maupun lokal.

Kondisi SDM

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Televisi dan Radio Parlemen didukung oleh sejumlah SDM yang terdiri dari PNS dan PPNASN yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, adapun komposisinya adalah:

TABEL 10
KARYAWAN BAGIAN TVR PARLEMEN

PEGAWAI	JUMLAH
PNS	43 pegawai
PPNASN	160 pegawai

TABEL 11
STRUKTURAL TVR PARLEMEN

JABATAN	JUMLAH
Kepala Bagian	1 orang
Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi	1 orang
Kepala Sub Bagian Teknik	1 orang
Kepala Sub Bagian Radio dan Tata Usaha	1 orang

Redaktur	3 orang
Produser	8 orang
Editor & Grafis	24 orang
Administrasi Redaksi	2 orang
Administrasi Kameramen	1 orang
Adm Teknik	1 orang
Kameramen	28 orang
Storage	4 orang
Program	17 orang
Reporter	25 orang
Presenter	4 orang
Penata Rias	2 orang
Ardok	2 orang
Inventaris	2 orang
IT	4 orang
IT Streaming	18 orang
Medsos & Web	4 orang
Ingest	4 orang
Teknik	17 orang
MCR	7 orang
Switcher	12 orang
Radio	10 orang

PROGRAM SIARAN TV PARLEMEN

- **SUARA DAPIL**

Program “Suara Dapil” bersama Anggota DPR RI, mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPR RI. Dikemas dengan sinematik yang indah, program “Suara Dapil” ditayangkan agar masyarakat memahami bagaimana kinerja anggota dewan saat turun ke dapil yang selama ini tidak terpublikasikan oleh media mainstream.



- **PEREMPUAN PARLEMEN**

Untuk menginspirasi para perempuan perempuan agar berani terjun ke dunia politik. Program ini ditujukan untuk membuktikan bahwa perempuan memiliki kiprah yang baik di Parlemen, baik itu dari sisi kinerja di dalam Gedung Parlemen, ataupun diluar Gedung Parlemen. Program “Perempuan Parlemen” berisi profil anggota DPR RI Perempuan yang memberikan inspirasi kepada masyarakat.



- **SIARAN STREAMING FORUM LEGISLASI**

Program yang berisi acara diskusi di ruang wartawan DPR RI mengenai RUU yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah maupun UU yang telah disahkan. Kegiatan ini secara khusus digelar Kerjasama antara Biro Pemberitaan Parlemen dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, namun TVR Parlemen juga memiliki program khusus untuk mengamplifikasi acara tersebut menjadi program siaran yang disiapkan secara khusus dan rutin setiap hari selasa.



- **DIALEKTIKA DEMOKRASI**

Program yang berisi acara diskusi di ruang wartawan DPR RI mengenai isu-isu terkini. Kegiatan ini secara khusus digelar kerjasama antara Biro Pemberitaan Parlemen dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, namun TVR Parlemen juga memiliki program khusus untuk mengamplifikasi acara tersebut menjadi program siaran yang disiapkan secara khusus dan rutin setiap hari selasa.



- **TVR 09**

Program “TVR 09” merupakan siaran langsung setiap Senin-Jumat Pukul 09.00 WIB di studio utama TVR Parlemen, membahas sejumlah isu terkini terkait DPR RI. Program ini disiarkan secara khusus dengan materi berita yang disiapkan oleh tim redaksi.



- **TVR 17**

Program “TVR 17” merupakan siaran langsung setiap Senin-Jumat Pukul 17.00 WIB di studio utama TVR Parlemen, membahas sejumlah isu terkini terkait DPR RI. Program ini disiarkan secara khusus dengan materi berita yang disiapkan oleh tim redaksi.



- **HOUSE NEWS**

Program “House News” menampilkan pemberitaan terkait DPR RI dengan *subtitle*, *voice over*, dan pembawa acara yang berbahasa Inggris.



- **KABAR NUSANTARA**

Program “Kabar Nusantara” membahas isu terkini yang sedang hangat dalam masyarakat dari sudut pandang DPR RI dan sudut pandang pakar terkait.



- **KALEIDOSKOP**

Kaleidoskop adalah program yang menyajikan informasi mengenai kinerja DPR RI terkait tugas dan fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, serta diplomasi. Program ini merefleksikan kinerja DPR RI selama periode waktu tertentu.



- **T.V.R 120**

T.V.R 120 adalah program berdurasi 2 menit, serta membahas isu terkini yang terkait akan pendapat atau tanggapan DPR RI terhadap isu tersebut.



- **EDITORIAL PARLEMEN**

Editorial Parlemen adalah program berdurasi ± 5 menit. editorial Membahas suatu berita terhangat secara mendalam yang berisi pandangan redaksi terhadap kejadian tersebut.



- **INTIP's**

“Informasi dan Tips” adalah program yang berdurasi ± 5 menit yang menampilkan *soft news*. *soft news* lebih berfokus pada sisi menarik atau hal unik dari sebuah peristiwa. Sehingga gaya penulisannya pun juga tidak terlalu kaku dan cenderung santai.



- **LENSA PARLEMEN**

Lensa Parlemen adalah tayangan singkat dengan durasi ± 2 menit berisi informasi mengenai upaya-upaya dan capaian DPR RI terhadap suatu isu yang sedang berkembang di masyarakat.



- **DARI RUANG SIDANG**

Program “Dari Ruang Sidang” TVR Parlemen memproduksi hasil liputan kegiatan dan menyiarkan Rapat DPR RI di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) langsung dari ruang sidang, sebagai upaya transparansi dan mendukung mewujudkan Parlemen Modern





TVR Parlemen menyiarkan secara langsung Konferensi Pers Pimpinan DPR RI

DUKUNGAN TEKNIK TELEVISI DAN RADIO

Tahun 2022, Tim Teknik TVR Parlemen mendapat tugas penting menjadi Official Broadcaster (TV Pool) untuk seluruh media televisi dari dalam dan luar negeri pada Sidang Pidato Kenegaraan 16 Agustus. TVR Parlemen juga meliput kegiatan berskala internasional, yaitu:

1. Official Broadcaster (TV Pool) Sidang 16 Agustus
2. Official Broadcaster Sidang IPU Ke 144 di Bali
3. Official Broadcaster Sidang P 20 di Jakarta



Untuk mendukung tugas peliputan dan kesinambungan siaran dukungan kru teknik dan peralatan yang mumpuni sangat diperlukan. Berikut sejumlah peralatan yang digunakan oleh Bagian TVR Parlemen:



Nama Alat : Kamera Sonny PXW 700

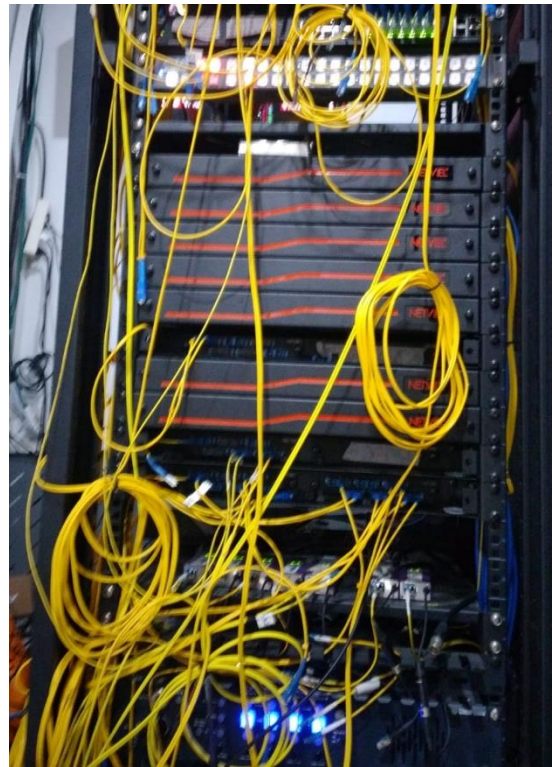
Penggunaan : Untuk penunjang Siaran Langsung Rapat Paripurna



Studio di Ruang Rapat Paripurna II, Gedung Nusantara II, PR RI, Senayan, Jakarta. Penggunaan untuk pusat kendali operasi siang dari ruang sidang, mencakup peralatan switcher dan kendali kru yang di lapangan



Studio di Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta. Penggunaan untuk pusat kendali operasi siang dari ruang sidang, mencakup peralatan switcher dan kendali kru yang di lapangan



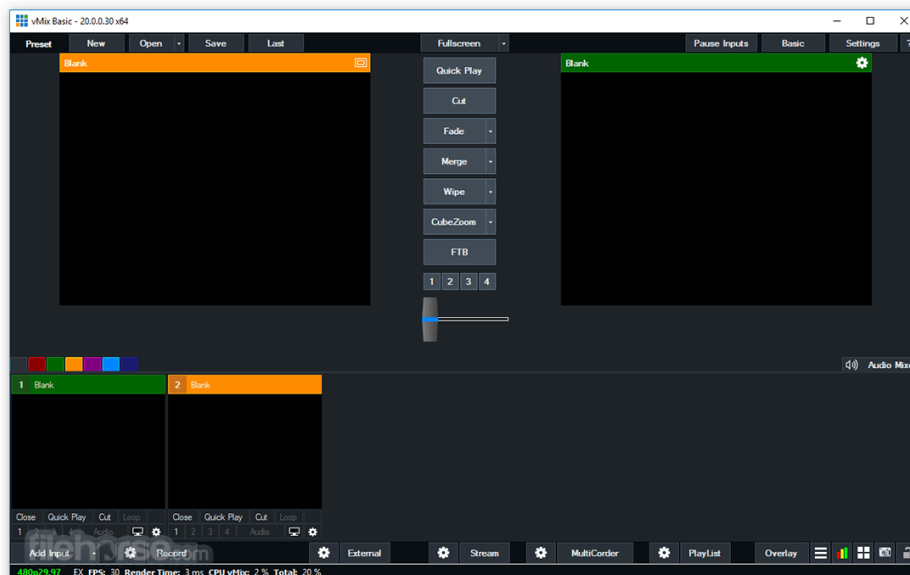
Streaming box dan server untuk penunjang siaran streaming TVR Parlemen di berbagai kanal seperti website, Youtube, IP TV dan media sosial



Kamera liputan merek Sonny NX-100



Kamera foto dan video merek Canon EOS 5D untuk dukungan dokumentasi



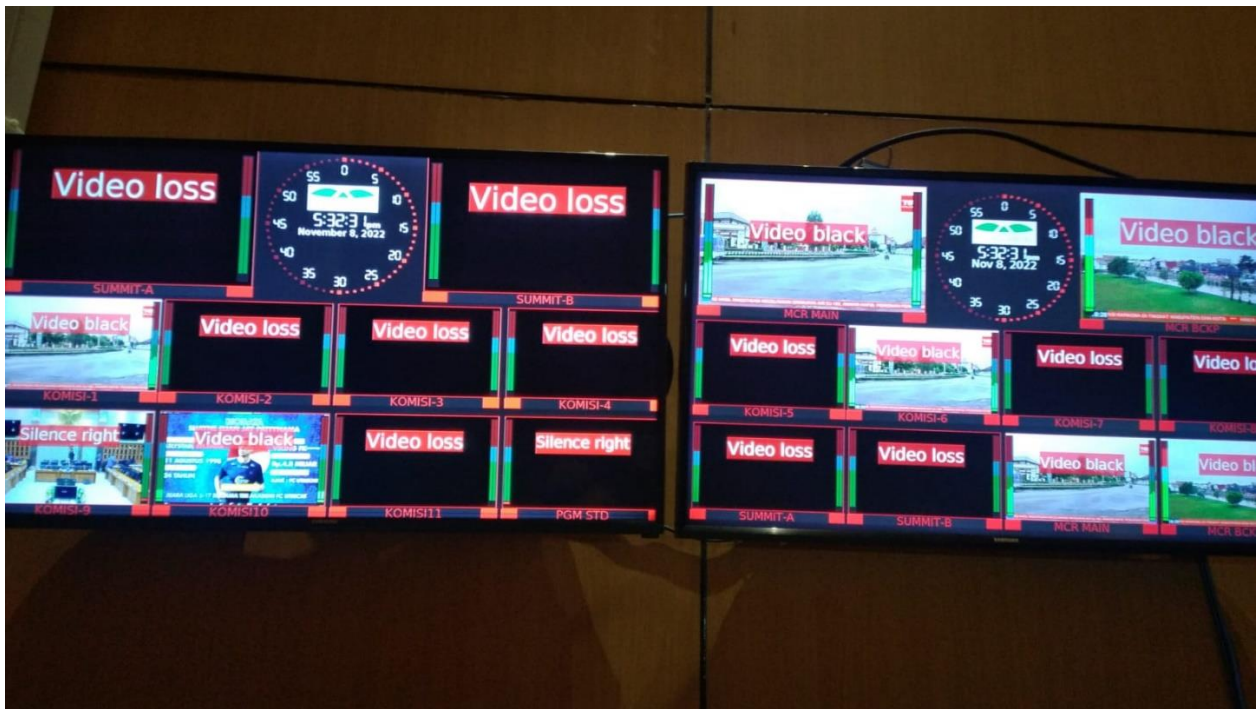
Software V-MIX untuk menunjang distribusi siaran streaming TVR Parlemen di Youtube, Facebook, dan Instagram. Sejumlah software yang digunakan TVR Parlemen didukung oleh Pustekinfo



Monitor broadcast yang berada di ruang control di depan Komisi II DPR RI



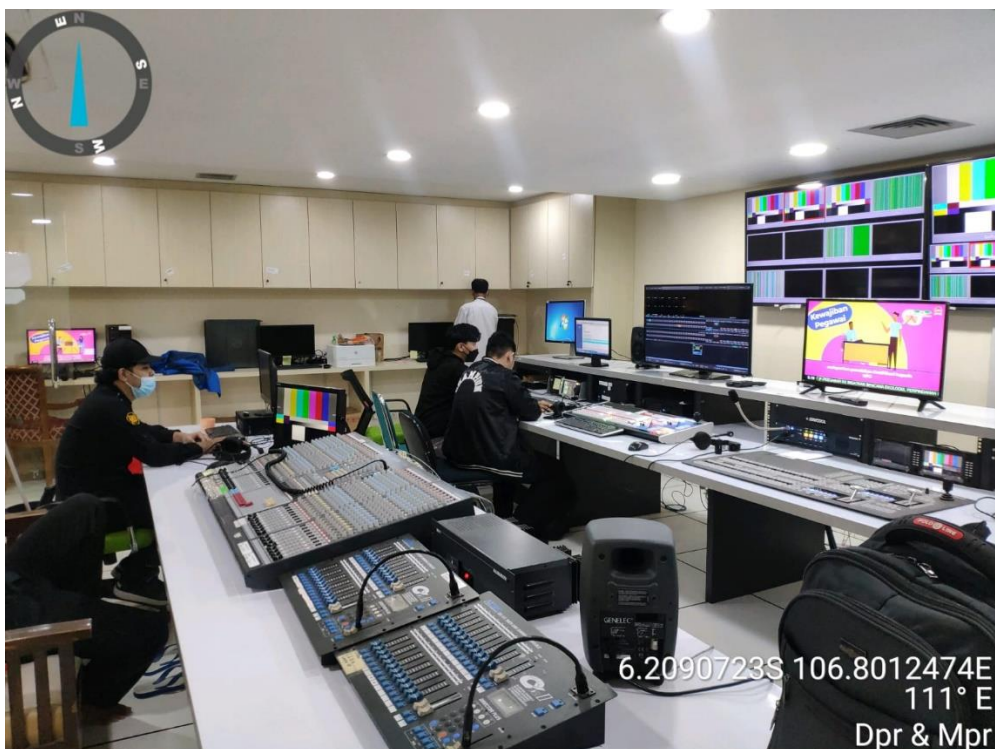
Studio TVR Parlemen yang berada di ruang control Komisi I – XI DPR RI berfungsi sebagai operator broadcast yang melayani live, tapping dan streaming



Kontrol giat live di setiap alat kelengkapan dewan



Studio utama TVR Parlemen yang dipergunakan untuk siaran live program TVR 09 dan TVR 17



Ruang Kontrol Studio Utama TVR Parlemen



Ruangan Master Control Room (MCR) TVR Parlemen yang berfungsi sebagai pusat kendali siaran televisi

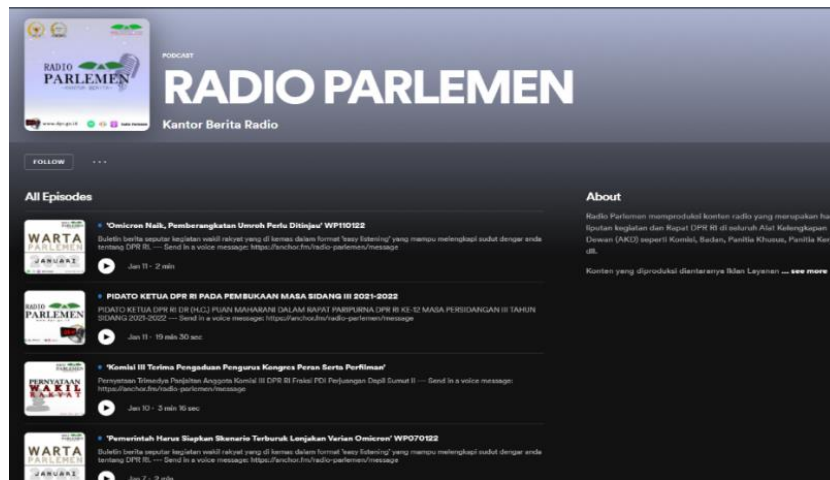
Untuk membangun pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR, Radio Parlemen berkreasi dengan menghadirkan sejumlah program sesuai dengan karakter dan keunggulan media radio, program tersebut sebagai berikut:

TABEL 13
PROGRAM RADIO PARLEMEN

NO	NAMA PROGRAM	URAIAN	PENYIARAN	OUTPUT
1	Rapat Wakil Rakyat	Siaran langsung atau rekaman rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.	Streaming Radio Lokal	Publik mengetahui kinerja anggota DPR pada saat rapat
2	Pernyataan Wakil Rakyat	Kapsul berdurasi 3 – 5 menit tentang pernyataan wakil rakyat yang menunjukkan perhatian anggota dewan terhadap isu tertentu terutama terkait masalah rakyat.	Streaming Podcast Spotify, Apple dan Google podcast Radio Lokal	Publik mengetahui pernyataan yang disampaikan anggota DPR dalam sidang dan kegiatan lainnya.
3	Sudut Dengar Parlemen	Wawancara anggota dewan berdurasi 10-15 menit tentang isu aktual.	Streaming Podcast Spotify, Apple dan Google podcast Radio Lokal	Publik mengetahui lebih dalam tentang isu tertentu
4	PSA	Iklan Layanan Masyarakat	Streaming Podcast Spotify, Apple dan Google podcast Radio Lokal	Publik menerima pesan tentang sikap DPR terhadap isu tertentu atau hari besar nasional
5	Dialog Bersama Wakil Rakyat	Dialog dengan anggota dewan berdurasi 30-45 menit tentang isu aktual	Streaming RRI Nasional Radio Lokal	Publik dapat berdialog langsung dengan wakil rakyat
6	Profil Wakil Rakyat	Profil anggota DPR berdurasi 5-7 menit	Streaming Podcast Spotify, Apple dan Google podcast	Publik semakin mengenal wakilnya

			Radio Lokal	
8	Warta Parlemen	Program berita hard news dengan durasi 2 menit.	Streaming Podcast Spotify, Apple dan Google podcast Radio swasta Radio Lokal	Publik mengetahui informasi aktual yang menjadi perhatian DPR
9	Bintang Orator	Lomba orasi sekaligus menghimpun masukan publik terkait produk legislasi yang sedang dibahas DPR.	Streaming Podcast Spotify, Apple dan Google podcast Radio Lokal	Publik mendapat kesempatan memberikan masukan tentang produk legislasi yang sedang dibahas DPR
10	Lokakarya dengan Radio Lokal	Pertemuan dan diskusi untuk membangun pemahaman tentang kinerja anggota DPR RI. Lokakarya diharapkan menghasilkan sinergi antara Radio Parlemen dengan Radio Lokal dalam menyiarkan kegiatan dewan sekaligus saling bertukar program.	Streaming Podcast Spotify, Apple dan Google podcast Radio Swasta Radio Lokal	Memperluas jangkauan pendengar melalui kerja sama dengan radio lokal





Radio Parlemen sebagai kantor berita radio, menyediakan audio podcast di platform spotify, google dan apple podcast yang dapat didengar publik kapan saja-audio on demad. Konten ini juga didownload dan disiarkan ulang oleh radio lokal di tanah air

Lokakarya TVR Parlemen di Kabupaten Indramayu



Lokakarya Sinergi TVR Parlemen Dengan TV Dan Radio Lokal Dalam Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja Anggota DPR. Output lokakarya adalah pertukaran program antara TVR Parlemen dengan TV dan radio lokal

Lokakarya TVR Parlemen di Kabupaten Malang



Lomba Orasi Bintang Orator

Pelaksanaan Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) yang diselenggarakan TV & Radio Parlemen sebagai langkah kreatif dalam mensosialisasikan program legislasi dan pembahasan RUU yang sedang dibahas DPR RI. Publik ditantang untuk memberikan masukan terhadap produk legislasi yang sedang dibahas sambil berorasi. Tiga orang pemenang ditetapkan sebagai pemenang atau Bintang Orator. Hasil orasi peserta menjadi masukan bagi AKD yang sedang membahas produk legislasi terkait.



Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan menerima masukan peserta LOBO terhadap RUU Anti Narkotika



Wakil Ketua BKSAP DPR Gilang Dhielafararez menerima masukan dari peserta LOBO bagi Delegasi DPR yang mengikuti Sidang IPU ke-144 di Bali.

Memorandum of Understanding dengan LPP RRI



TVR Days di UIN Jakarta



TVR Days di UNPAD, Bandung



Penghargaan Indonesia Award 2022 dari I-News untuk Kategori Digital Transformation



Penghargaan dari Radio Sonora Kategori Excellent Government Appreciation Award Tahun 2022



Penghargaan Elshinta Award Kategori Mitra Kontributif



Radio Parlemen oleh Spotify Dinobatkan Sebagai Konten Kreator Berita Paling Produktif Sepanjang Tahun 2022



ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

1. Belum dapat dilakukan sistem kerja sift untuk memenuhi waktu kerja sejalan dengan waktu siaran TV Parlemen. Waktu kerja karyawan TVR Parlemen adalah pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.30 WIB. Berarti total waktu penyiaran adalah 15 jam. Rentang waktu sepanjang itu sebaiknya dibagi dalam dua sift kerja. Akan tetapi sejauh ini belum ada kebijakan bekerja berdasarkan pembagian waktu/shift sehingga untuk mengawal kesinambungan siaran dilaksanakan jam lembur bagi karyawan bagian tertentu secara bergantian. Karyawan yang mendapat tugas lembur sering terkendala datang tepat waktu pada saat jam kerja esok hari. Untuk jangka panjang ini tentu dapat mengganggu kondisi kesehatan. Jadi diperlukan peraturan yang dapat memberikan ruang bagi karyawan bekerja dalam dua sift.
2. Status karyawan yang mendukung kinerja TVR Parlemen saat ini adalah PNS dan PPNPN. Untuk mendukung kinerja ke depan perlu memberikan status kerja yang dapat memberikan ketenangan bagi karyawan PPNPN.
3. Perlu peremajaan alat siaran dengan yang lebih baru, salah satu nya adalah kamera robotic yang selama ini terdapat di ruang rapat akd. Saat ini kondisi kamera tersebut sudah kurang layak dan tua, sehingga gambar yang dihasilkan tidak optimal.
4. Perlu ada peremajaan studio yang modern dan menggunakan teknologi mutakhir.
5. Ke depan TVR Parlemen perlu siaran secara Free to Air (FTA)/ DVB T2.
6. Pada tahun 2023 akan lebih menyeimbangkan porsi alokasi anggaran kegiatan produksi dan penayangan program di stasiun TV swasta.
7. Perlu berlangganan Nielsen Ariana untuk mempermudah penghitungan jumlah penonton TVR Parlemen.

C. BAGIAN PENERBITAN

Bagian Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

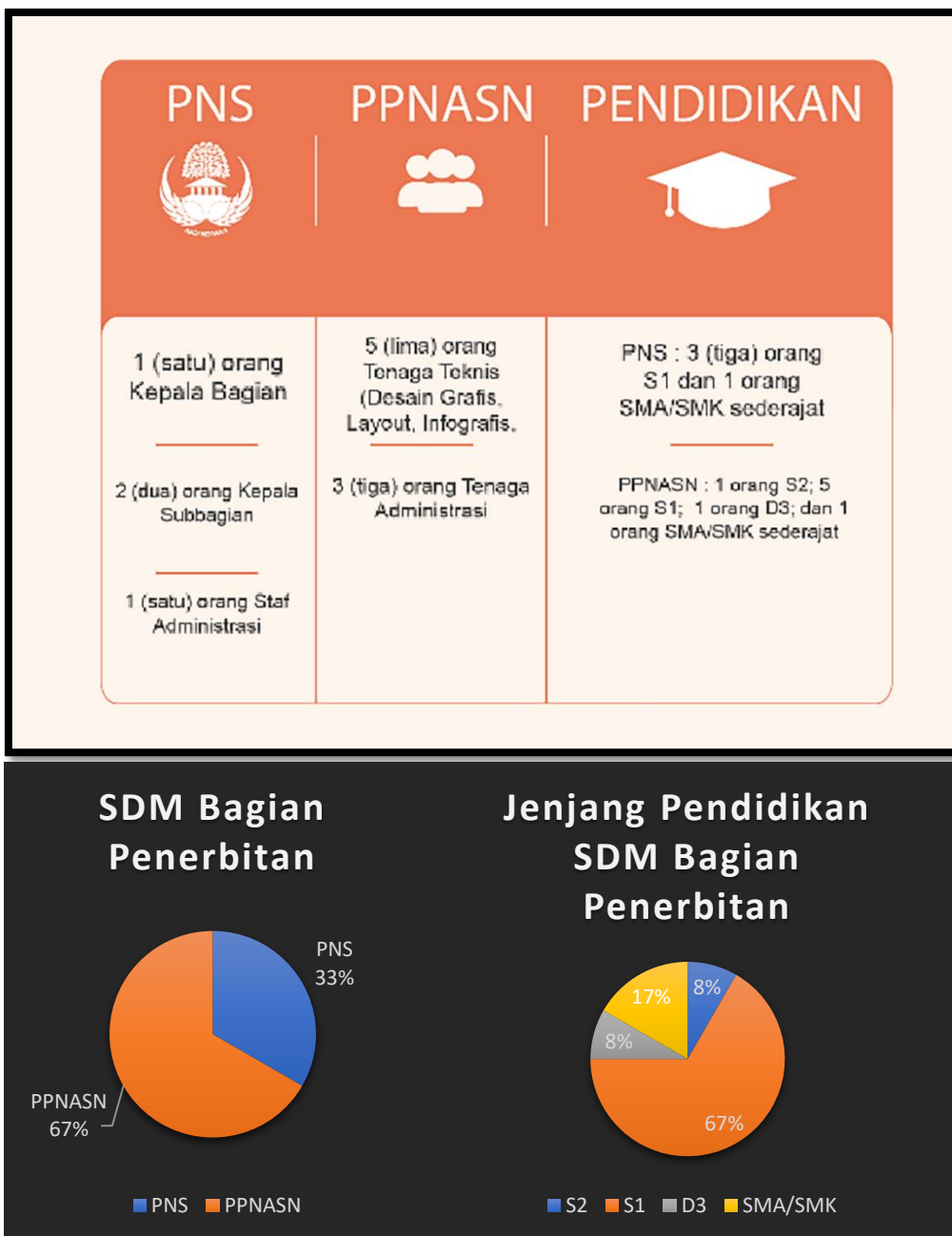
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penerbitan menjalankan fungsi:

- Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Bagian Penerbitan;
- Penyusunan Bahan Kegiatan di Bagian Penerbitan;
- Pelaksanaan Kegiatan di Bagian Penerbitan;
- Pelaksanaan Proses Produksi;
- Pelaksanaan Distribusi Produk Terbitan;
- Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Bagian Penerbitan;
- Pelaksanaan Kegiatan Lain yang ditugaskan oleh Biro Pemberitaan Parlemen;
- Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.

Bagian penerbitan saat ini telah beralih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara digital, yang semula pencetakan dilakukan secara Konvensional (mengurangi jumlah cetakan dalam bentuk fisik) dan beralih ke format digital.

Sasaran Kinerja	Indikator	Target 2022	Capaian	%
Persentase Majalah dan Buletin Parlementaria yang disampaikan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Mendistribusikan kepada beberapa layanan publik Mensosialisasikan di berbagai digital media terkait cetakan majalah dan buletin pada beberapa tempat 	60 Edisi	60 Edisi	100%
Mensosialisasikan aplikasi E-Media kepada khalayak umum serta memberikan layanan yang inovatif	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan E-Media sebagai bahan riset dan publikasi pada sektor Pendidikan Memosisikan E-Media sebagai referensi berita yang akurat, tepat dan terpercaya 	150.000	156.000	104%
Menempatkan perangkat Kiosk Touchscreen pada beberapa layanan publik serta membuat konten yang informatif dan kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan <i>conference</i> dan sosialisasi Kiosk pada beberapa instansi Mengkombinasikan beberapa konten Biro Pemberitaan Parlemen dengan informasi yang akan ditampilkan pada masing-masing instansi 	18 Titik Lokasi (DPR RI, Perpusnas, Bandara Halim PK, Soetta, Stasiun Gambir, UPN)	14 Titik Lokasi (DPR RI, Perpusnas, Bandara Halim PK, Stasiun Gambir, UPN)	77,8 %
Memproduksi buku, mendesain serta mempublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> Merancang layout buku terbitan Dewan dan Setjen DPR RI yang dinamis Mendesain cover dan struktur buku yang proporsional Mempublikasikan baik pada media cetak maupun digital 	15 Judul Buku	21 Judul Buku	140%

1. Kapasitas SDM



Kualifikasi Pendidikan di Bagian Penerbitan terdiri dari:

- PNS : 3 (tiga) orang S1 dan 1 orang SMA/SMK sederajat
- PPNASN : 1 orang S2; 5 orang S1; 1 orang D3; dan 1 orang SMA/SMK sederajat.

Komposisi pegawai di Bagian Penerbitan :

- Subbagian Produksi terdiri dari 2 orang PNS dan 5 orang PPNASN
- Subbagian Distribusi terdiri dari 1 orang PNS dan 3 orang PPNASN

2. Capaian Sasaran Strategis Bagian Penerbitan Tahun 2021 s.d. 2023

Kemajuan capaian sasaran strategis Bagian Penerbitan Tahun 2021 s.d. 2023 sebagai berikut :

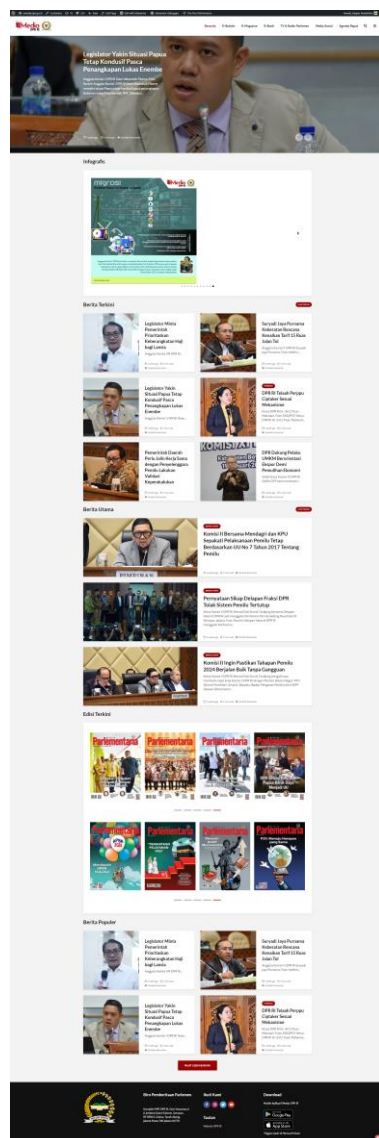
Tahun	Kegiatan
2021	Penyusunan konsep/rancangan Publishing House; Penambahan SDM di bidang penerbitan; Pembangunan aplikasi E-Media DPR RI sebagai kanal Pemberitaan Parlemen.
2022	E-Publishing, Pengembangan aplikasi dan website E-Media DPR RI; Pembuatan SOP dan standar layanan di bidang penerbitan; Peningkatan kompetensi SDM di bidang penerbitan digital.
2023	<i>Integrated Publishing</i> , Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Permintaan Penerbitan yang mengoptimalkan keterpaduan proses mulai dari permintaan, proses produksi, distribusi, publikasi dan dokumentasi

3. Website dan Aplikasi DPR RI

E-Media DPR RI menjadi salah satu platform Pemberitaan pada Sekretariat Jendral DPR RI. E-Media DPR RI dapat diakses melalui website dan apps (android). Untuk kedepan sedang dikembangkan agar dapat diakses melalui IOS (Apple)



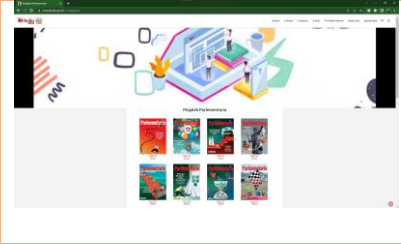


E-Media DPR RI memiliki beberapa menu untuk mengakses :

- E-Magazine
- E-Bulletin
- E-Book
- E-TV PARLEMEN
- E-RADIO PARLEMEN



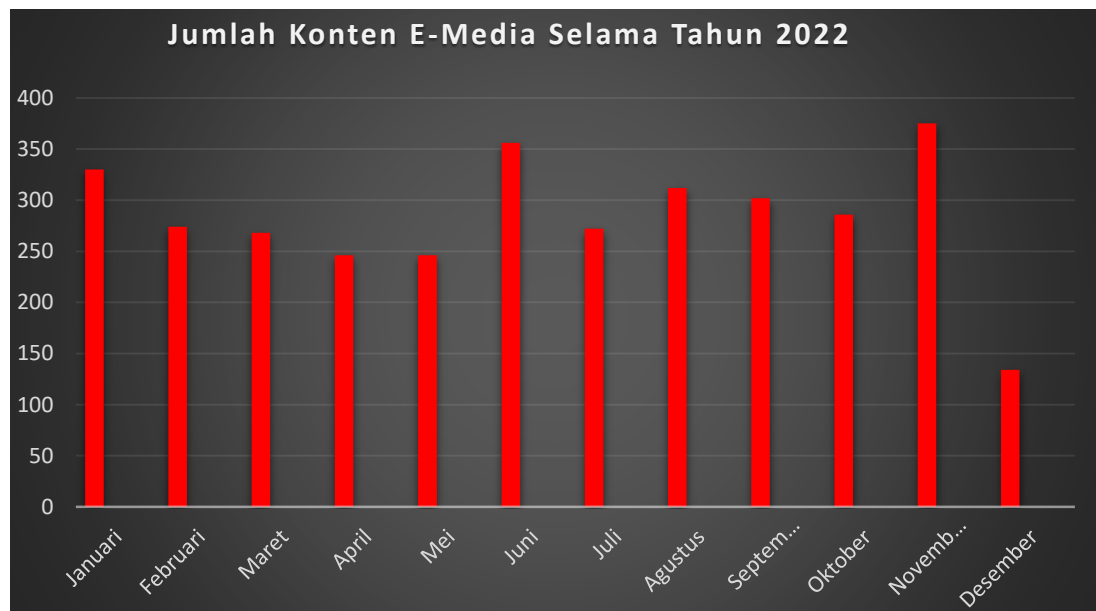
serta berbagai media sosial DPR RI Seperti : Instagram, youtube, Twitter & tiktok DPR RI. Selain itu terdapat fitur berita terkini yg diambil dari website www.dpr.go.id yg bersumber dari metaksos

Salah satu fitur e-media terdapat **articlebase** yang memuat berita atau konten dari majalah ataupun Buletin Parlemenaria, adapun pada tahun 2022, rincian jumlah artikel base yang disajikan adalah :

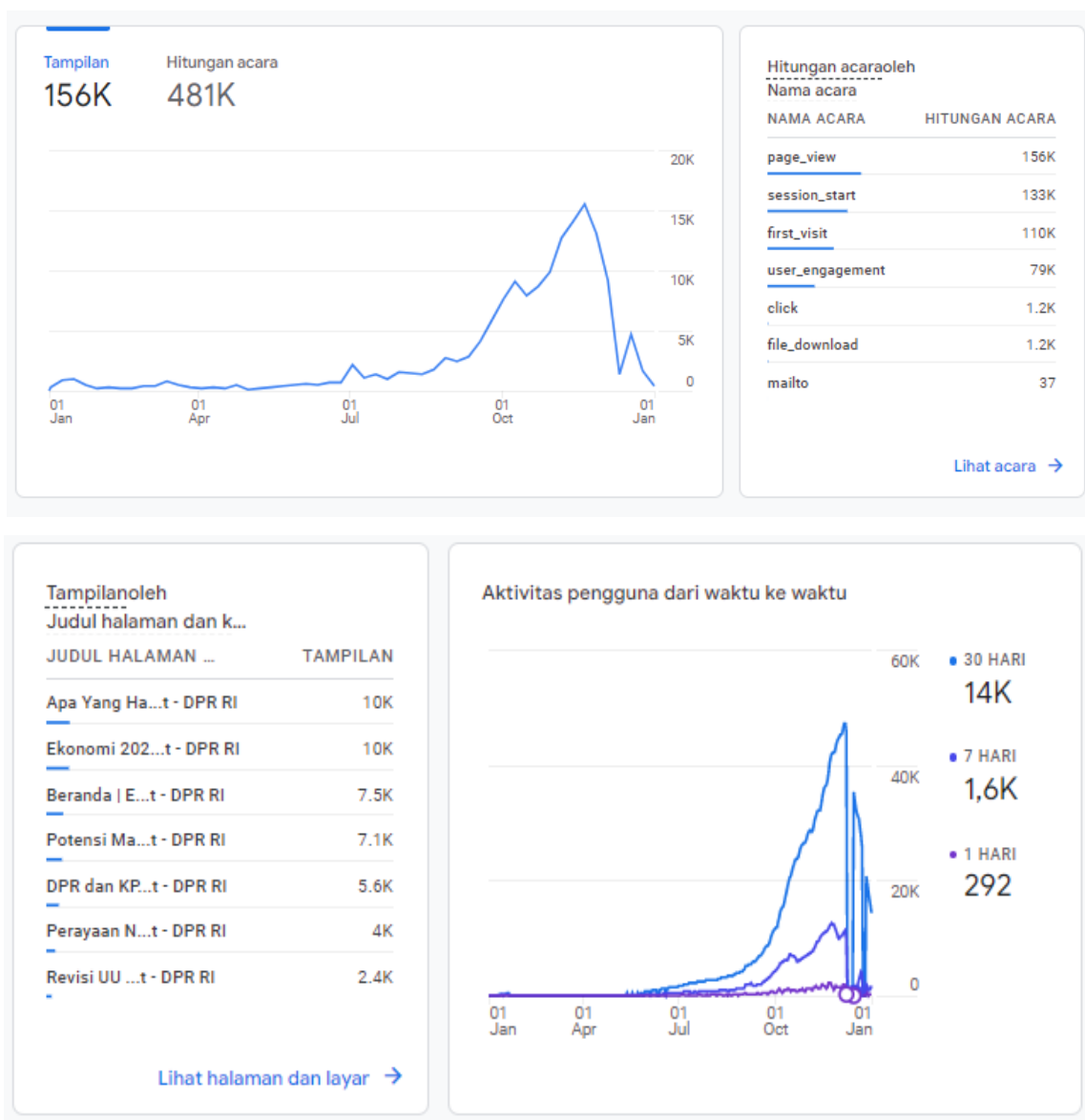
	<p>Berita Terkini (Harian) 1.746 Artikel</p>
	<p>Buletin 48 Buletin 1 Buletin 22 Artikel (48x22) = 1.046 Artikel</p>
	<p>Majalah 12 Majalah, 1 Majalah 40 Artikel (12x40) = 480 Artikel</p>
	<p>Banner Apps Dibuat sesuai dengan hari besar dan <i>highlight</i> berita yang sedang trending</p>
	<p>Infografis Berdasar Usulan Isu Agenda setting Biro Pemberitaan Parlemen</p>

Disamping itu pada header aplikasi terdapat banner yang dinamis dan berfungsi sebagai ucapan atau visualisasi peringatan tertentu seputar kenegaraan, Bagian Penerbitan pada tahun 2022 memproduksi 80 desain banner yang ditampilkan.

Untuk memperkaya konten pada E-Media, Bagian Penerbitan telah memproduksi Infografis, yaitu usulan agenda setting ataupun informasi yang divisualisasikan dengan data ataupun grafik sebanyak 3 s.d. 6 infografis setiap minggunya, total hasil produksi infografis selama tahun 2022 berjumlah 37 desain tergambar dengan rincian rekapitulasi sbb :



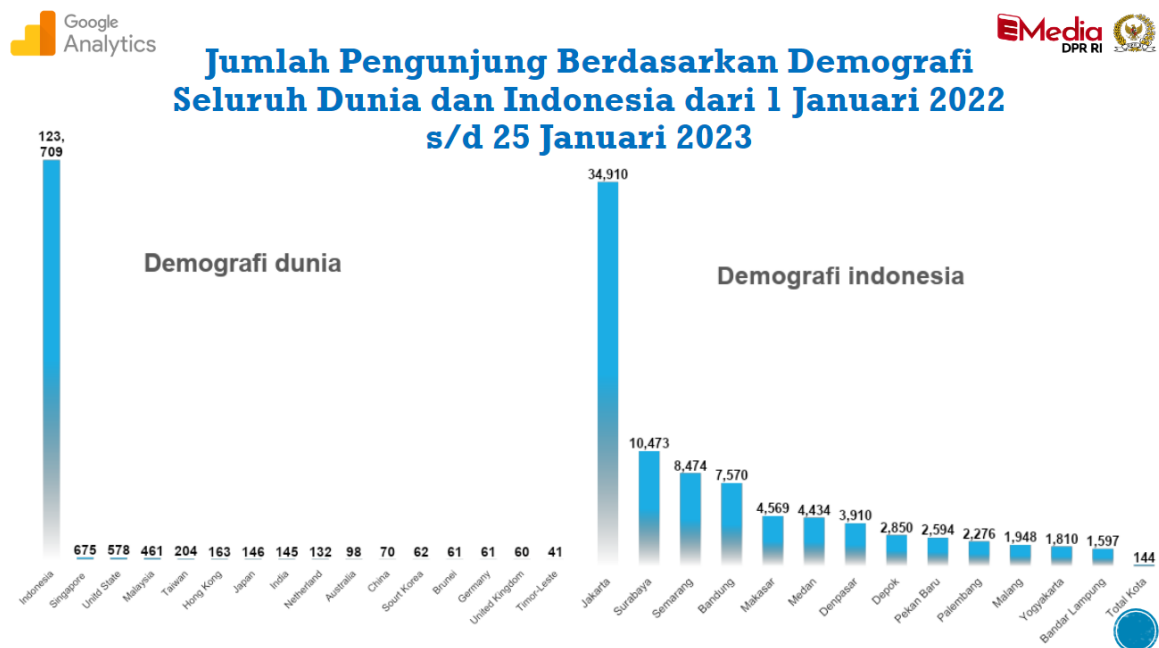
Sosialisasi E-Media DPR RI Selama Tahun 2022 belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran sosialisasi E-Media dalam DIPA TA. 2022. Sosialisasi yang dilakukan berupa ajakan persuasive yang dilakukan secara langsung kepada individu atau kelompok untuk mengakses E-Media DPR RI. Kegiatan ini berdampak positif dan menjadi magnet bagi user untuk mengakses E-Media. Tercatat pada <https://analytics.google.com> jumlah pengguna E-Media sebanyak 156.000 user dari berbagai kalangan dan negara, yang terlihat pada grafik sebagai berikut :



Berdasarkan statistic dari *Google Analytic* rata – rata durasi pengguna E-Media berkisar antara 29 – 36 detik per artikel dan dari engagement per pengguna sebesar 0,48, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Pengguna E-Media DPR RI juga berasal dari berbagai negara, data menunjukkan terdapat 50 negara asal pengguna E-Media. Berikut sebaran 7 negara dengan jumlah pengguna E-Media terbanyak sepanjang tahun 2022



4. Kiosk Touchscreen Digital Signage DPR RI

Kiosk Touchscreen Digital Signage DPR RI merupakan media digital mengenai kegiatan dan kinerja DPR RI, yang menampilkan informasi baik yang diliput melalui Media Cetak, Media Sosial, Media TV dan Radio Parlemen, serta Media Online. Tujuan pengadaan Kiosk Touchscreen Digital Signage yaitu :

- Dapat memberikan konten informasi seperti gambar, video dan teks berjalan;
- Dapat mengambil file majalah dan buletin Parlemen dan cetakan buku Dewan lainnya dalam format PDF;
- Fitur gambar dan video dapat meningkatkan daya tarik masyarakat dan mudah dalam menyampaikan berbagai informasi kegiatan dan produk Dewan lainnya.
- Dokumen arsip yang terjaga sepanjang waktu dan bisa diremajakan secara teknologi
- *Cost effectiveness* untuk jangka panjang,
- Menunjang program ramah lingkungan.



a. Pemasangan dan instalasi Kiosk Touchscreen di Perpustakaan Nasional RI

Berbagai jenjang pendidikan menjadikan Perpustakaan Nasional RI sebagai wadah informasi dari berbagai bidang sehingga membuat Bagian Penerbitan memutuskan untuk meletakkan Kiosk Touchscreen sebagai wadah informasi bagi yang membutuhkan guna menyampaikan kegiatan DPR RI kepada masyarakat.



b. Pemasangan dan instalasi Kiosk Touchscreen di Stasiun Gambir

Stasiun Gambir menjadi salah satu pilihan peletakan Kiosk Touchscreen karena tingkat pengguna kereta api semakin bertambah, Kiosk Touchscreen menjadi media informasi digital mengenai kegiatan dan kinerja DPR RI.



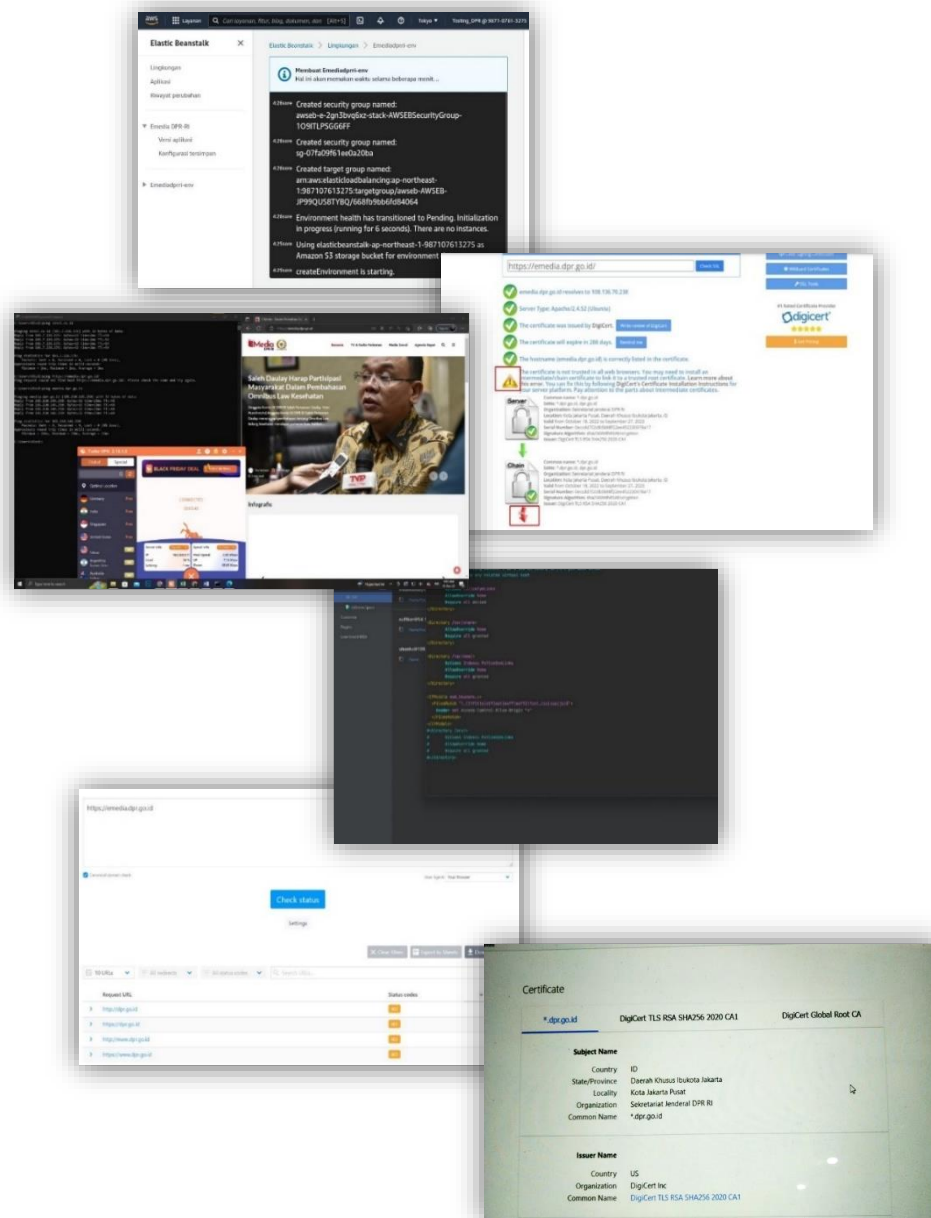
c. Pemasangan dan instalasi Kiosk Touchscreen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Penempatan Kiosk Touchscreen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, ditujukan untuk mahasiswa guna mendapatkan informasi seputar DPR RI yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan akademika.



5. Migrasi E-Media DPR RI dari akun penyedia ke akun penerbitan yang berada di Server Amazon Web Service (AWS).

Bagian Penerbitan pada tahun 2022 telah melakukan proses migrasi E-Media yang semula berada pada akun penyedia dialihkan ke akun penerbitan yang berada di cloud server AWS. Hal ini karena pada tahun 2023 akan melakukan pengembangan aplikasi dan website aplikasi E-Media DPR RI Untuk itu pengelolaan aplikasi harus dilakukan secara mandiri, *maintenance* dan pengembangan guna mengoptimalkan aplikasi. Adapun proses dalam pelaksanaan migrasi server, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.



6. Penerbitan Majalah Parleментарia

Penerbitan Majalah Parleментарia pada tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 12 edisi yang terbit 1 (satu) edisi per-bulan, setiap edisinya sebanyak 1500 eksemplar. Majalah Parleментарia juga dapat dibaca melalui aplikasi menu E-Magazine maupun Berita Terkini pada aplikasi dan website E-Media DPR RI dalam bentuk *articlebase* maupun *flipbook*. Setiap edisi majalah Parleментарia terdiri dari 40 artikel, dan setiap artikel diubah dalam bentuk *articlebase* untuk diupload kedalam aplikasi dan website E-Media DPR RI





7. Penerbitan Buletin Parleментарia

Penerbitan Buletin Parleментарia pada tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 48 edisi yang terbit 4 (empat) edisi setiap bulan, setiap edisinya sebanyak 1500 eksemplar



8. Pencetakan Buku-Buku Dewan dan Setjen DPR RI

Bagian penerbitan melakukan Pencetakan buku-buku Dewan dan Setjen DPR RI yang telah dilakukan pada tahun 2022.

<p>Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen</p> 	<p>Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi National Interest dan Agenda Pembangunan</p> 
<p>Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945</p> 	<p>Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi National Interest dan Agenda Pembangunan Revisi</p> 
<p>A Century of Parliamentary Life in Indonesia</p> 	<p>Antologi Problematik Ranah Pembangunan Sistem Ekonomi dan Hukum di Negara Republik Indonesia</p> 

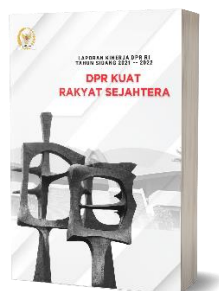
Majalah Auditama Edisi I-IV



Majalah Auditama Edisi II



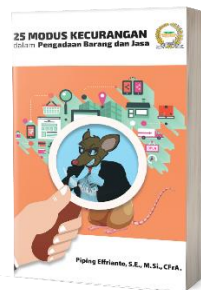
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022



Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan



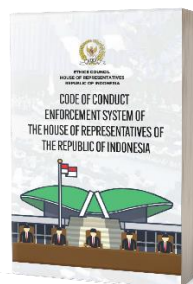
25 Modus Kecurangan dalam Barang dan Jasa



Penyelenggaraan Kearsipan DPR RI



Code of Conduct Enforcement System
of The House of Representatives
of The Republic of Indonesia



9. Kegiatan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)

- a. Mengadakan kegiatan diskusi tentang "Optimalisasi E-media Sebagai Media Informasi Yang Terupdate, Dinamis dan Responsif terhadap Berbagai Device" pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2022 menghadirkan 2 narasumber ahli media dari salah satu media online sebagai peningkatan kompetensi seputar aplikasi.



- b. Mengadakan kegiatan diskusi tentang “Sistem Monitoring dan Optimasi Device Kiosk Touchscreen” di Tangerang pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2022” sebagai peningkatan kompetensi seputar pengoperasian manajemen konten dan pengoptimalan Kiosk Touchscreen Digital Signed dan menghadirkan beberapa narasumber yang ahli dibidangnya.

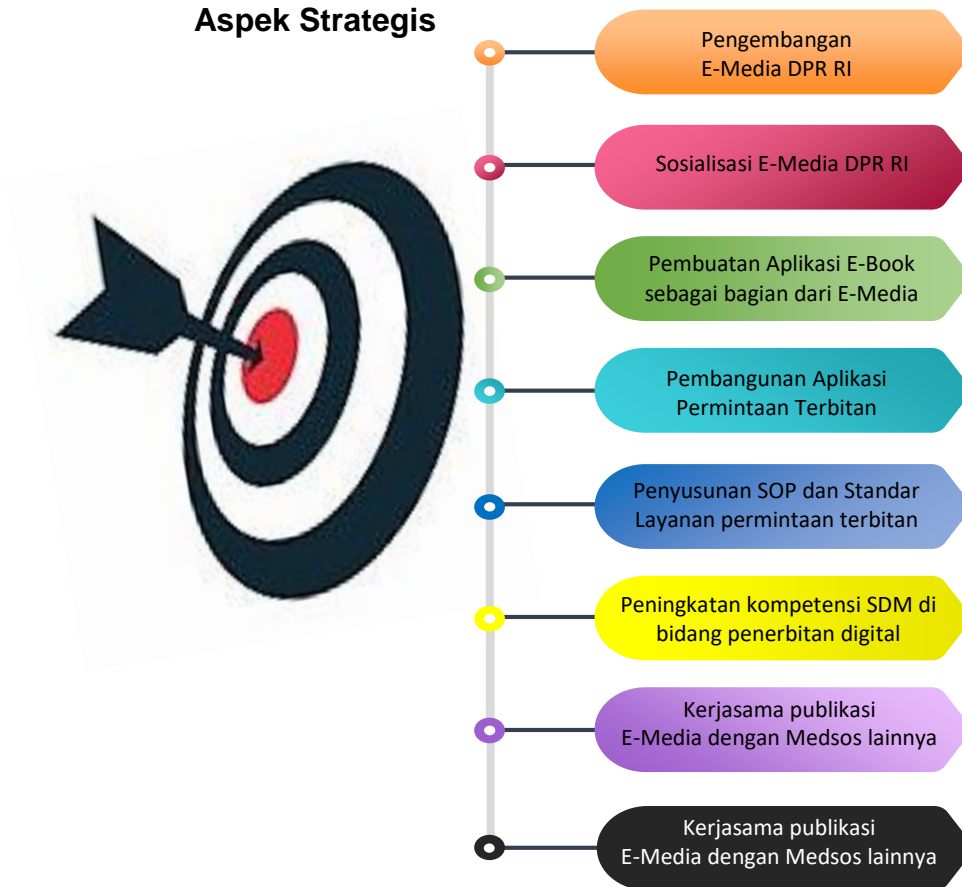


- c. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Digital Publishing Pengembangan Aplikasi E-Media DPR RI Berbasis Wordpress dan Perancangan Konten/Infografis Sebagai Penunjang Content Management System di Jimmiers Mountain Resort, Cisarua tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2022.



10. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Aspek Strategis

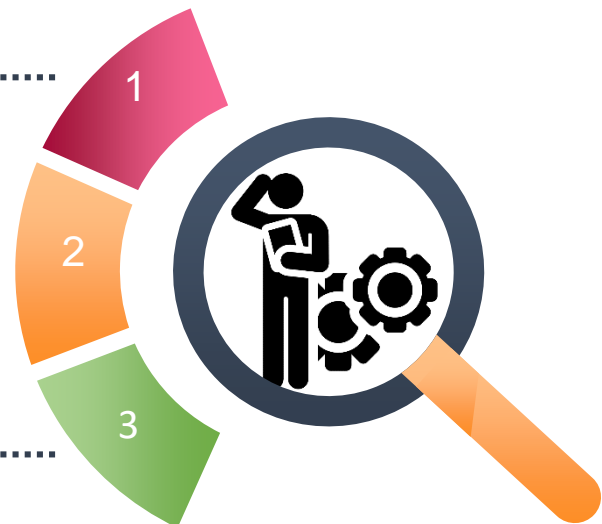


Permasalahan yang Dihadapi

Pengembangan E-Media kendalanya source code masih dipegang oleh pihak ketiga.

Sosialisasi E-Media kendalanya adalah dalam DIPA TA.2022 tidak ada alokasi anggaran untuk sosialisasi.

Knowledge Sharing pengelolaan E-Media tidak optimal. Kendalanya penyedia aplikasi: belum membuat dokumentasi pekerjaan.



D. BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

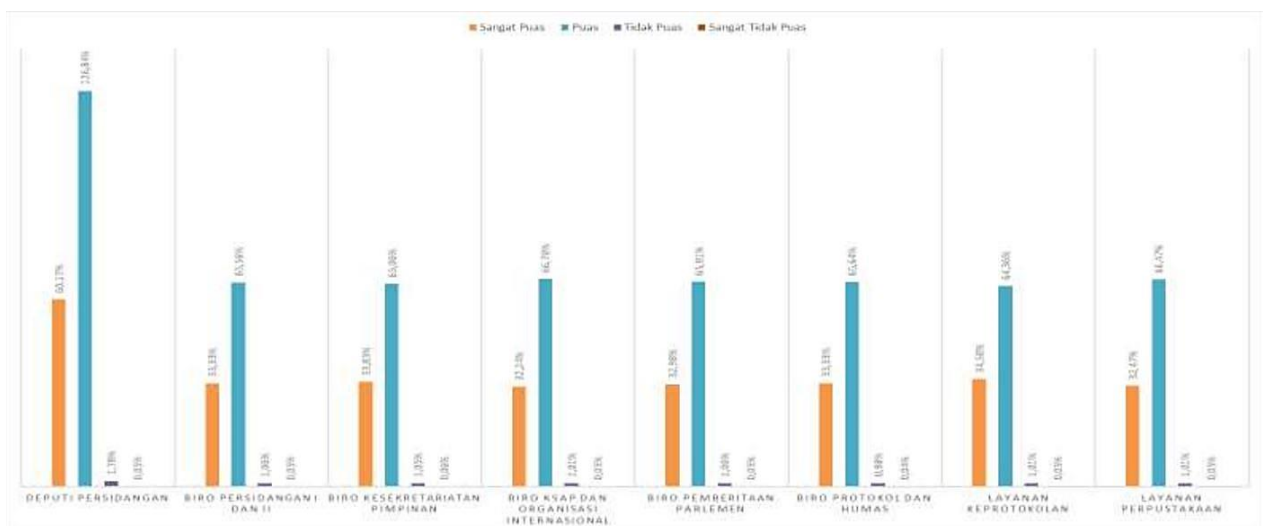
Sasaran Kinerja	Indikator 2.	Target	Capaian	%
3	Presentase realisasi anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	21.717.745.000	21.650.658.000	99,19%

Realisasi anggaran tersebut diantaranya untuk beberapa kegiatan diantaranya: pelaksanaan jamuan rapat-rapat, perjalanan dinas dalam rangka publishing house, pembayaran PPNPN tahun 2022, dan perawatan atau service peralatan.

Capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 di Biro Pemberitaan Parlemen di atas capaian realisasinya mencapai **99,19 persen**. Sementara pada tahun 2020, **95,40 persen**.

Menurut hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 terhadap Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, Indeks kepuasan Biro Pemberitaan Parlemen menempati urutan pertama di bawah Unit Deputi Bidang Persidangan dengan nilai **3,33** sebagaimana tertera dalam tabel-tabel di bawah ini.





BAB IV

PENUTUP

Laporan Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2022 disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akuntabel, akurat dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas dan manfaat bagi DPR RI maupun Setjen DPR RI.

Diharapkan laporan ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan untuk pengambilan keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan dukungan di bidang pengelolaan Media Cetak dan Media Sosial, Televisi dan Radio Parlemen, dan Penerbitan.

Semua kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kinerja akan menjadi fokus perbaikan di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani.